



RENCANA STRATEGIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2023 – 2026



**Kota Administrasi
Jakarta Selatan
Tahun 2022**

KATA PENGANTAR

Dengan rahmat Allah SWT, Rencana Strategis (Renstra) Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023-2026 telah dapat diselesaikan sebagai kewajiban yang diamanatkan secara rutin setiap lima tahun setelah penetapan RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026. Renstra ini merupakan acuan utama bagi seluruh entitas di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2023-2026.

Penyusunan Renstra ini berpedoman pada RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026, serta berpedoman pada tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi Tata Kerja Kota Administrasi.

Dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran pembangunan Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023-2026 perlu adanya keterlibatan pemangku kepentingan dan partisipasi serta dukungan seluruh elemen masyarakat dalam mensukseskan pembangunan di wilayah Jakarta Selatan.

Akhirnya, semoga Renstra Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023-2026 ini dapat menjadi pedoman bagi para pelaksana di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam melakukan tugasnya.

Jakarta, 16 Juni 2022

Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan



MUNIRIN, S.Sos., M.Si
NIP. 197108011994031002

DAFTAR ISI

COVER	I
KATA PENGANTAR	II
DAFTAR ISI	III
DAFTAR GAMBAR	IV
DAFTAR TABEL	V
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Landasan Hukum	5
I.3 Maksud dan Tujuan	8
I.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	11
II.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kota Administrasi Jakarta Selatan	32
II.2 Sumber Daya Kota Administrasi Jakarta Selatan	39
II.2.1 Sumber Daya Manusia Kota Administrasi Jakarta Selatan	39
II.2.2 Aset atau Modal Kota Administrasi Jakarta Selatan	46
II.3 Kinerja Pelayanan Kota Administrasi Jakarta Selatan Periode 2017-2022	55
II.3.1 Capaian Indikator Kinerja Kota Administrasi Jakarta Selatan Periode 2017-2022	55
II.3.2 Realisasi Anggaran Kota Administrasi Jakarta Selatan Periode 2017-2022	58
II.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kota Administrasi Jakarta Selatan	60
II.4.1 Tantangan	60
II.4.2 Peluang	65
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	68
III.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kota Administrasi Jakarta Selatan	68
III.1.1 Permasalahan Makro Pelayanan Wilayah Kota Administrasi	69
III.1.2 Permasalahan Pelayanan di Bagian-Bagian Kantor Administrasi Jakarta Selatan	71
III.2 Telaah Tata Ruang Wilayah	75
III.3 Penentuan Isu-isu Strategis	77
III.3.1 Isu Global	77
III.3.2 Isu Nasional	77
III.3.3 Isu Regional (Provinsi DKI Jakarta)	82
III.3.4 Isu Lokal (Kota Administrasi Jakarta Selatan)	86
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	91
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	92
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	95
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN	113
BAB VIII PENUTUP	115
DAFTAR PUSTAKA	116

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Proses Penyusunan Renstra Kota Administrasi Jakarta Selatan Periode 2023-2026	5
Gambar 2.1	Lambang Kota Administrasi Jakarta Selatan	12
Gambar 2.2	Peta Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan	14
Gambar 2.3	Piramida Penduduk Kota Administrasi Jakarta Selatan 2021	17
Gambar 2.4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Administrasi Jakarta Selatan periode tahun 2017-2021	18
Gambar 2.5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Administrasi Jakarta Selatan tahun 2020-2021	19
Gambar 2.6	Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2020-2021	20
Gambar 2.7	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Jakarta Selatan (miliar rupiah), 2017–2021	21
Gambar 2.8	Persentase Penduduk Miskin di Kota Jakarta Selatan Tahun 2017–2021	26
Gambar 2.9	Struktur Organisasi Kota Administrasi Jakarta Selatan	38
Gambar 2.10	Anggaran dan Realisasi Tahun 2018-2021	59

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Tahun 2020 Kota Administrasi Jakarta Selatan	15
Tabel 2.2	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kota Jakarta Selatan Tahun 2016-2020 (Milliar Rupiah)	22
Tabel 2.3	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kota Jakarta Selatan Tahun 2016-2020 (Persen)	23
Tabel 2.4	Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran, Kota Jakarta Selatan Tahun 2016-2020 (Persen)	24
Tabel 2.5	Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur Sekretariat Kota	39
Tabel 2.6	Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur Kecamatan dan Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Selatan	40
Tabel 2.7	Jumlah Pegawai Menurut Golongan Sekretariat Kota	41
Tabel 2.8	Jumlah Pegawai Menurut Kecamatan dan Kelurahan	42
Tabel 2.9	Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Sekretariat kota	43
Tabel 2.10	Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Kecamatan dan Kelurahan	44
Tabel 2.11	Jumlah Pegawai Menurut Jabatan Sekretariat Kota	45
Tabel 2.12	Jumlah Pegawai Menurut Jabatan Kecamatan dan Kelurahan	45
Tabel 2.13	Jumlah Aset menurut Jenis pada Kota Administrasi Jakarta Selatan sampai dengan Tahun 2022	46
Tabel 2.14	Jumlah Aset Tanah Kota Administrasi Jakarta Selatan sampai dengan Tahun 2022	47
Tabel 2.15	Jumlah Aset Gedung dan Bangunan Kota Administrasi Jakarta Selatan sampai dengan Tahun 2022	47
Tabel 2.16	Jumlah Aset/ Modal Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Selatan sampai dengan Tahun 2022	48
Tabel 2.17	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2018-2021	54
Tabel 2.18	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kota Administrasi Jakarta Selatan Periode 2017-2022	56
Tabel 3.1	Identifikasi Permasalahan Makro Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi	70
Tabel 3.2	Identifikasi Permasalahan Bagian-Bagian Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi	72
Tabel 3.3	Isu Strategis Kota Administrasi Jakarta Selatan	89
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023-2026	91
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kota Administrasi Jakarta Selatan 2023-2026	93
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Indikatif Kota Administrasi Jakarta Selatan 2023-2026	96
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023-2026	113

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Rencana strategis (strategic planning) atau Renstra merupakan suatu proses pemilihan tujuan organisasi; penentuan strategi, kebijakan dan program strategis yang diperlukan untuk tujuan-tujuan; dan penetapan metode-metode yang diperlukan untuk menjamin bahwa strategi dan kebijakan telah diimplementasikan. Secara lebih ringkas, Renstra merupakan proses perencanaan jangka panjang yang disusun dan digunakan untuk menentukan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi (Handoko, 2016). Secara eksplisit Renstra berhubungan dengan manajemen perubahan yang mencakup serangkaian proses dari inovasi dalam perubahan organisasi. Apabila strategic planning tidak mendukung inovasi dan perubahan, akan mengalami kegagalan (Lorange, 1980).

Menurut Kerzner (2001), Rencana strategis (Renstra) adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Rencana strategis adalah sebuah petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk mereka bekerja menuju lima sampai 10 tahun ke depan.

Rencana strategis merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang, dan kendala serta ancaman yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung tujuan, sasaran, serta cara pencapaian yang realistis untuk mengantisipasi perkembangan masa depan. Perencanaan strategis dapat memfasilitasi komunikasi dan partisipasi, mengakomodasi kepentingan dan nilai yang berbeda, dan membantu pembuatan keputusan secara tertib maupun

keberhasilan implementasi keputusan (Byson, 2001).

Ada tiga alasan yang menunjukkan pentingnya perencanaan strategik. Pertama, perencanaan strategik memberikan kerangka dasar dalam mana semua bentuk-bentuk perencanaan lainnya harus diambil. Kedua, pemahaman terhadap perencanaan strategik akan mempermudah pemahaman bentuk-bentuk perencanaan lainnya. Ketiga, perencanaan strategik sering merupakan titik permulaan bagi pemahaman dan penilaian kegiatan-kegiatan manajer dan organisasi (Handoko, 2016).

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa rencana strategis merupakan acuan dasar untuk menentukan strategi yang dilakukan oleh suatu organisasi atau institusi untuk mengelola kondisi saat ini, agar dapat melakukan proyeksi kondisi pada masa yang akan datang.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) Daerah untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) untuk jangka waktu 5 tahun dan rencana pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Hal ini sesuai juga dengan Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, yang mengamanatkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun sesuai periode masing-masing pemerintah daerah.

Disamping itu, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 272 ayat (1), menyatakan bahwa "Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD", dan ayat (2) menyatakan bahwa "Rencana

strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta akan berakhir pada tahun 2022, untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut diisi dengan Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta sejak tahun 2022 hingga dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta hasil Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022, maka Gubernur DKI Jakarta harus menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026. Selain itu, Kepala Perangkat Daerah (PD) juga harus menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2023-2026).

Kota Administrasi Jakarta Selatan merupakan salah satu kota administrasi di Provinsi DKI Jakarta dan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayahnya, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat di wilayahnya, membina kecamatan dan kelurahan serta melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Gubernur sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan penyusunan RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026, maka Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai sebuah perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renstra Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023-2026.

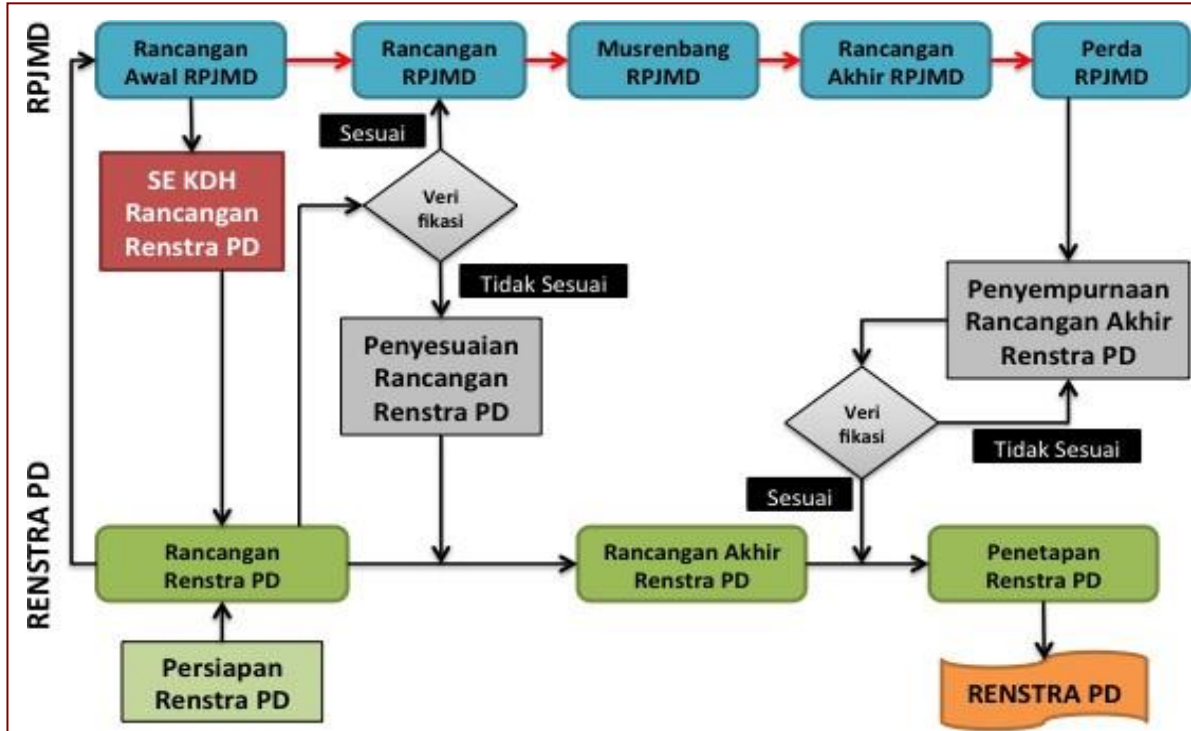
Rencana Strategis (Renstra) digunakan Kota Administrasi Jakarta Selatan

sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada sehingga tujuan yang akan dicapai dapat secara realistis mengantisipasi perkembangan masa depan.

Renstra Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023-2026 disusun secara simultan dengan penyusunan RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 memuat tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, program/kegiatan/sub kegiatan, dan kinerja urusan akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kota Administrasi Jakarta Selatan setiap tahunnya, yang dimulai pada tahun 2023. Proses penyusunan Renstra Kota Administrasi Jakarta Selatan dilaksanakan dengan beberapa tahap, sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan rancangan Renstra Kota Administrasi Jakarta Selatan;
2. Penyusunan rancangan Renstra Kota Administrasi Jakarta Selatan;
3. Konsultasi publik (forum PD);
4. Penyusunan rancangan akhir Renstra Kota Administrasi Jakarta Selatan;
5. Penetapan Renstra Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Adapun bagan alir penyusunan Renstra Kota Administrasi Jakarta Selatan yang di mulai dari penyusunan rancangan Renstra Kota Administrasi Jakarta Selatan sampai dengan penetapan Renstra Kota Administrasi Jakarta Selatan dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Proses Penyusunan Renstra Kota Administrasi Jakarta Selatan Periode 2023-2026

Dengan disusunnya Renstra Kota Administrasi Jakarta Selatan Periode 2023-2026, maka seluruh entitas Kota Administrasi Jakarta Selatan diharapkan mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam mewujudkan peningkatan kualitas kebijakan dan pelayanan urusan pemerintahan umum (mengkoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat di wilayahnya, membina kecamatan dan kelurahan serta melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Gubernur) dengan memperhatikan keselarasan kebijakan pembangunan daerah dengan setiap Perangkat Daerah, sehingga Kota Administrasi Jakarta Selatan dapat turut andil dalam mewujudkan tujuan dan agenda prioritas pembangunan Provinsi DKI Jakarta 2023-2026.

1.2 Landasan Hukum

Dalam Penyusunan Rencana Strategis Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023-2026, sejumlah rujukan perundang-undangan dalam menyusun Perubahan Renstra, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,

Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
17. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 050/3499/SJ dan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
18. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 (Lembaran Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (Lembaran Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014 Nomor 301);
20. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi (Berita Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 Nomor 62050);
21. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.

I.3 Maksud dan Tujuan

I.3.1 Maksud

1. Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai tujuan Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam periode 2023-2026;
2. Sebagai Indikator kunci keberhasilan bagi pihak manajemen Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam melaksanakan fungsinya.

I.3.2 Tujuan

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja tahunan Kota Administrasi Jakarta Selatan;
2. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Kinerja Kota Administrasi Jakarta Selatan.

I.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab I terdapat empat sub bab yang berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

I.1 Latar Belakang

I.2 Landasan Hukum

I.3 Maksud dan Tujuan

I.4 Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KOTA ADMINISTRASI KOTA JAKARTA SELATAN

Bab II terdapat empat sub bab tentang tugas, fungsi dan struktur Kota Administrasi Jakarta Selatan; kondisi sumber daya yang dimiliki oleh Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya; kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan yang dilakukan Kota Administrasi Jakarta Selatan.

II.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kota Administrasi Jaksel.

II.2 Sumber Daya Kota Administrasi Jakarta Selatan.

II.3 Kinerja Pelayanan Kota Administrasi Jakarta Selatan.

II.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kota Administrasi Jakarta Selatan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Pada bab ini terdapat lima sub bab yang berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kota Administrasi

Jakarta Selatan; telaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih; telaah kebijakan kewilayahan Jakarta Selatan, serta penentuan isu-isu strategis.

III.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kota Administrasi Jakarta Selatan.

III.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

III.3 Arah Kebijakan Kewilayahan Jakarta Selatan Berdasarkan RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2023-2026.

III.4 Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Kota Administrasi Jakarta Selatan.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan Kota Administrasi Jakarta Selatan.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan serta pendanaan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kota Administrasi Jakarta Selatan periode 2023-2026.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Mengemukakan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran sesuai visi dan misi RPJMD ditunjukkan dengan indikator kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang mengacu tujuan dan sasaran RPD.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Dengan lahirnya Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1b3/1/1/66 dimana penataan wilayah administratif Pemerintah Kotapraja Jakarta terbagi menjadi 5 wilayah kota, merupakan dasar terbentuknya Wilayah Administrasi Kotamadya Jakarta Selatan, yang membutuhkan lokasi perkantoran sendiri yang lebih memadai. Sebelum Keputusan Gubernur diberlakukan, di Jakarta Selatan terdapat Kantor Pemerintahan Kotabaru Kebayoran Baru yang beralamat di Jl. Hang Lekir I No.5, yang dikepalai oleh seorang Kepala Kantor dan berada langsung di bawah Urusan Pemerintahan Umum (UPU) Departemen Dalam Negeri dimana pejabatnya diberi kedudukan setingkat Wedana.

Kepala Kantor Pemerintahan Kotabaru Kebayoran Baru dijabat oleh Almarhum Bapak H. Mochtar Zakaria, SH dengan Almarhum Bapak H. M. A. Adiwidjaya sebagai Asisten Wedana. Pada masa jabatan beliau, lokasi ke kantor baru di Jl. Radio V Kelurahan Kramat Pela, Kantor di Jl. Radio V Kelurahan Kramat Pela. Dalam jangka waktu 30 tahun, pemakaian gedung Kantor Walikotamadya Jakarta Selatan di Jl. Trunojoyo No. 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan telah berubah, seiring dengan perubahan signifikan di wilayah Jakarta Selatan, baik dalam jumlah penduduk, pegawai maupun pembangunan di bidang ekonomi, sosial dan keamanan.

Perubahan-perubahan yang sangat cepat mempengaruhi pelayanan pemerintah terhadap masyarakat di Jakarta Selatan. Salah satu yang terasa adalah penggunaan kantor di Jl. Trunojoyo yang sudah tidak memenuhi standar pelayanan sebagai Kantor Pelayanan Masyarakat. Pada awal tahun 1996, diajukan usul perluasan gedung di Jl. Trunojoyo ini kepada Gubernur

KDKI Jakarta yang saat itu dijabat oleh Bapak Suryadi Sudirja, namun Pak Gubernur tidak berkenan untuk menyetujuinya.

Pada bulan Desember 1996 dibuat lagi perencanaan pembangunan Kantor Walikotamadya sebagai perbaikan dari rencana perluasan sebelumnya dengan lokasi tetap di Jl. Tronojoyo No.1. Berdasarkan evaluasi rencana induk sebelumnya serta hasil pengarahannya Walikotamadya, pada tanggal 26 Desember 1996 rencana pembangunan gedung Kantor Walikotamadya Jakarta Selatan kembali dipresentasikan kepada Bapak Gubernur Suryadi Sudirja. Sejak itu dimulailah babak baru dalam perencanaan pembangunan Gedung Kantor Walikotamadya Jakarta Selatan di Blok P Kelurahan Petogogan Kecamatan Kebayoran Baru.

Lambang Kotamadya Jakarta Selatan berbentuk perisai lima didalamnya terlukis pohon Rambutan dan buah Rambutan Rapih (Flora) serta burung Gelatik (Fauna) yang mengandung arti alam lingkungan yang hijau dan teduh yang melambangkan persatuan, kekuatan dan ketenangan serta kebersamaan.



Gambar 2.1 Lambang Kota Administrasi Jakarta Selatan

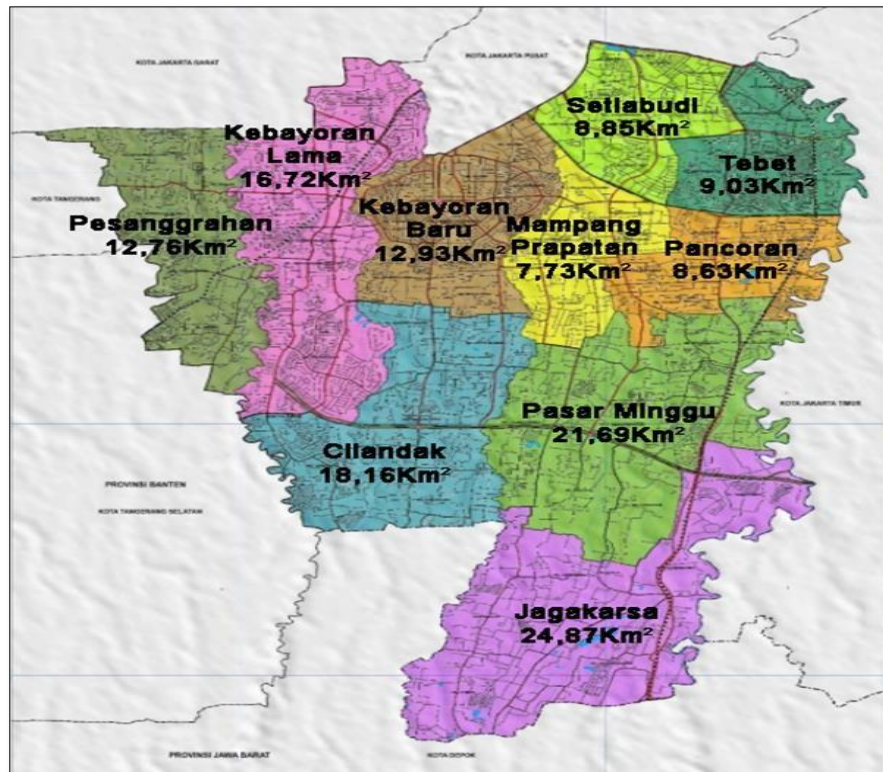
Pada tahun 2018, Jakarta Selatan yang memiliki 10 Kecamatan dan 65 Kelurahan. Kelurahan dan kecamatan ini terus berbenah, baik dari segi pelayanan publik maupun sistem informasi yang berbasis Smart City

Jakarta. Selain itu, layanan situs resmi Kota Administrasi Kota Jakarta Selatan, selatan.jakarta.go.id maupun layanan helpdesk corner melalui helpdeskselatan.jakarta.go.id.

Secara astronomis, Kota Administrasi Jakarta Selatan terletak antara $6^{\circ}15'40,8''$ Lintang Selatan dan $106^{\circ}45' 0,00''$ Bujur Timur. Rata-rata curah hujan 2394,6 mm; harian hujan 182 hari; kelembaban 76,7%; penyinaran matahari 4,2%; suhu $28,5^{\circ}\text{C}$; kecepatan angin 2,9 m/det; dan tekanan udara 1.009,3 mb.

Posisi geografisnya Kota Administrasi Jakarta Selatan berbatasan langsung dengan Kota Administrasi Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Kota Tangerang dan Kota Depok. Kota Administrasi Jakarta Selatan terbagi menjadi 10 kecamatan, yaitu : Jagakarsa, Pasar Minggu, Cilandak, Pesanggrahan, Kebayoran Lama, Kebayoran Baru, Mampang Prapatan, Pancoran, Tebet dan Setiabudi (Gambar 2.2).

Luas wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan, berdasarkan SK Gubernur No.171 Tahun 2007 adalah $141,27 \text{ Km}^2$ (20,76 persen) dari luas Provinsi DKI Jakarta. Kota Administrasi Jakarta Selatan merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 26,2 meter di atas permukaan laut. Ketinggian maksimum berada 5-50 meter di atas permukaan laut. Adapun peta wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan terdapat pada Gambar 2.2 di bawah ini.



Gambar 2.2 Peta Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan
Sumber : Jakarta Selatan dalam Angka, 2021

Berdasarkan Gambar 2.2 menunjukkan luas wilayah kecamatan Jagakarsa sebesar 24,87 Km² (17,60%), Pasar Minggu sebesar 21,69 Km² (15,35%), Cilandak sebesar 18,16 Km² (12,85%), Kebayoran Lama sebesar 16,72 Km² (11,84%), Kebayoran Baru sebesar 12,93 Km² (9,15%), Pesanggrahan sebesar 12,76 Km² (9,03%), Tebet sebesar 9,03 Km² (6,39%), Setiabudi sebesar 8,85 Km² (6,26%), Pancoran sebesar 8,53 Km² (6,04%), dan Mampang Prapatan sebesar 7,73 Km² (5,47%). Dengan demikian, berdasarkan luas wilayah tiap kecamatan, Jagakarsa (24,87 Km² atau 17,60%) merupakan kecamatan terluas. Sedangkan Mampang Prapatan (7,73 Km² atau 5,47%) merupakan kecamatan terkecil.

Kota Administrasi Jakarta Selatan tidak luput dari kejadian bencana, baik bencana alam atau lingkungan (banjir, tanah longsor, dan gempa) maupun bencana non alam (kebakaran dan pandemi Covid-19). Kejadian bencana utama seperti kebakaran, banjir, dan pandemi Covid-19 menunjukkan

frekuensi kejadian yang tinggi. Kebakaran merupakan bencana non alam yang sering terjadi di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Bencana ini umumnya terjadi di lokasi pemukiman padat penduduk dan pasar yang disebabkan oleh arus pendek listrik. Kesadaran masyarakat untuk hidup dengan budaya perkotaan diperlukan untuk memperkecil terjadinya bencana kebakaran.

Penduduk Kota Administrasi Jakarta Selatan merupakan modal dasar dalam pelaksanaan proses pembangunan. Proyeksi penduduk tahun 2020 di Kota Administrasi Jakarta Selatan terdapat pada Tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Tahun 2020
Kota Administrasi Jakarta Selatan

No.	Kecamatan	Luas Area	Penduduk		Jumlah	Kepadatan	Sex Ratio
			Laki-laki	Perempuan			
1	Jagakarsa	24,87	182.355	180.736	363.091	14.681,85	101
2	Pasar Minggu	21,69	166.754	165.071	331.825	15.369,25	101
3	Cilandak	18,16	111.708	113.624	225.332	12.477,03	98
4	Pesanggrahan	12,76	132.303	132.364	264.667	20.755,97	100
5	Keb. Lama	16,72	165.207	164.235	329.442	19.844,25	101
6	Keb. Baru	12,93	77.828	78.909	156.737	12.113,62	99
7	Mp. Prapatan	7,73	80.416	78.663	159.079	20.336,83	102
8	Pancoran	8,53	88.425	88.294	176.719	20.639,55	100
9	Tebet	9,03	120.584	121.675	242.259	26.574,80	99
10	Setiabudi	8,85	59.021	58.830	117.851	13.258,18	100
Jumlah		141,27	1.184.601	1.182.401	2.367.002	16.768,64	102

Sumber : Bidang Data dan Informasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, 23 Februari 2021.

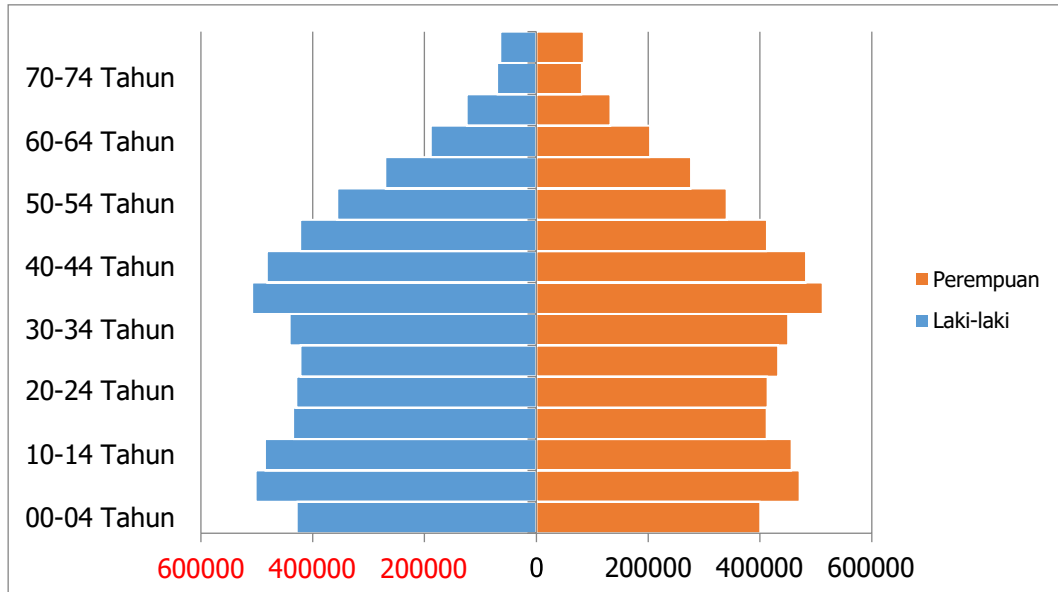
Berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2020, penduduk Kota Administrasi Jakarta Selatan diketahui sejumlah 2.367.002 jiwa yang terdiri atas 1.184.601 jiwa penduduk laki-laki dan 1.182.401 jiwa penduduk perempuan. Sementara itu rasio jenis kelamin tahun 2020, penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 102. Hal ini berarti jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Data rasio jenis kelamin berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang

berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil seperti pendidikan dan keterwakilan dalam parlemen di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Jumlah penduduk Kota Administrasi Jakarta Selatan diketahui tahun 2020 sejumlah 2.367.002 jiwa, mengalami penurunan menjadi 2.226.800 jiwa pada tahun 2021. Hal ini disebabkan salah satunya karena terjadi pandemi Covid-19 yang menimbulkan banyak korban jiwa di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Kepadatan penduduk di Kota Administrasi Jakarta Selatan tahun 2020 mencapai 16.768,64 jiwa/Km². Kepadatan penduduk di 10 kecamatancukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Tebet sebesar 26.574,80 Jiwa/Km² dan terendah di KecamatanKebayoran Baru sebesar 12.113,62 jiwa/Km². Kota Administrasi Jakarta Selatan termasuk dalam kategori sangat padat (≥ 400 jiwa/Km²), khususnya di kecamatan Tebet diperlukan peremajaan lingkunganpemukiman perkotaan, pemerataan dan persebaran penduduk ke wilayah kecamatan lain dan penggalakan program keluarga berencana (KB) agar lebih optimal.

Kota Administrasi Jakarta Selatan berdasarkan komposisi penduduk umur, terdapat pada piramida penduduk sebagai berikut.



Gambar 2.3 Piramida Penduduk Kota Administrasi Jakarta Selatan 2021
 Sumber : Bidang Data dan Informasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, 23 Februari 20

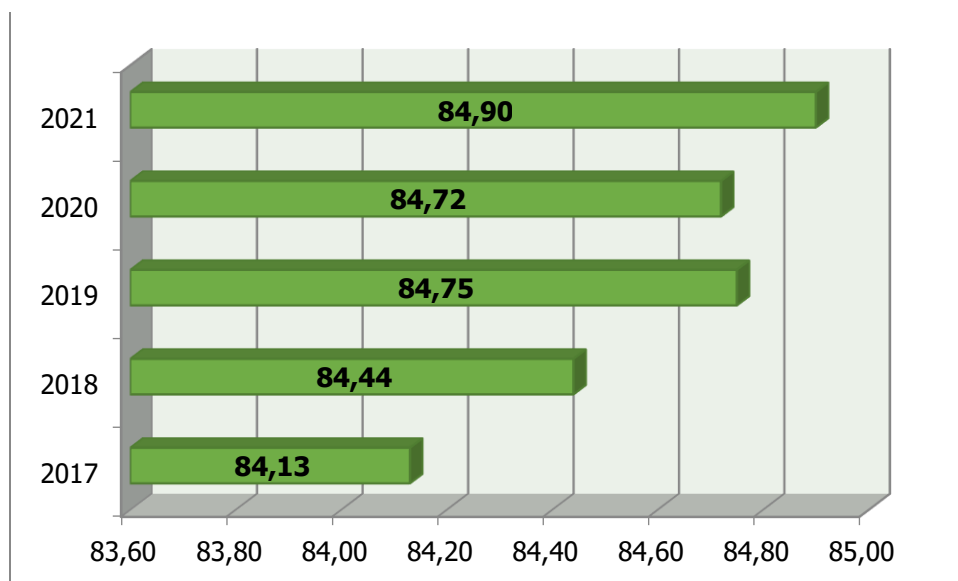
Pada Gambar 2.3 menunjukkan bahwa bentuk piramida penduduk yang menyerupai segitiga. Penduduk Kota Administrasi Jakarta Selatan dapat dikatakan berstruktur umur muda. Hal ini dapat dilihat dari persentase penduduk usia anak-anak (0 – 14 tahun) sebesar 24,51%, jumlah penduduk yang berusia produktif (15 – 64 tahun) berjumlah 70,49%, dan jumlah penduduk lansia (≥ 65 tahun) tergolong kecil yaitu 4,99%. Hal yang perlu ditindaklanjuti terkait piramida penduduk menyerupai segitiga Kota Administrasi Jakarta Selatan adalah penyediaan lapangan pekerjaan yang sangat banyak, karena bonus demografi yang terjadi nantinya.

Struktur umur penduduk juga digunakan untuk melihat Rasio Ketergantungan (dependency ratio). Rasio ketergantungan (dependency ratio) adalah unsur penting yang dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Semakin tinggi persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif, untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif. Sebaliknya persentase dependency ratio yang semakin rendah

menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif.

Pada tahun 2020 Rasio Ketergantungan (dependency ratio) di Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar 42%. Angka ini menyimpulkan terdapat 42 orang usia tidak produktif yang ditanggung oleh 100 orang penduduk usia produktif di Kota Administrasi Jakarta Selatan, termasuk dalam kategori Rasio Ketergantungan (dependency ratio) rendah (≤ 50). Rasio Ketergantungan (dependency ratio) tersebut akan memacu penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya, dan menjadi modal untuk mendorong proses pembangunan yang dilaksanakan oleh Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Administrasi Jakarta Selatan periode tahun 2017-2021 terdapat pada Gambar 2.4 di bawah ini.



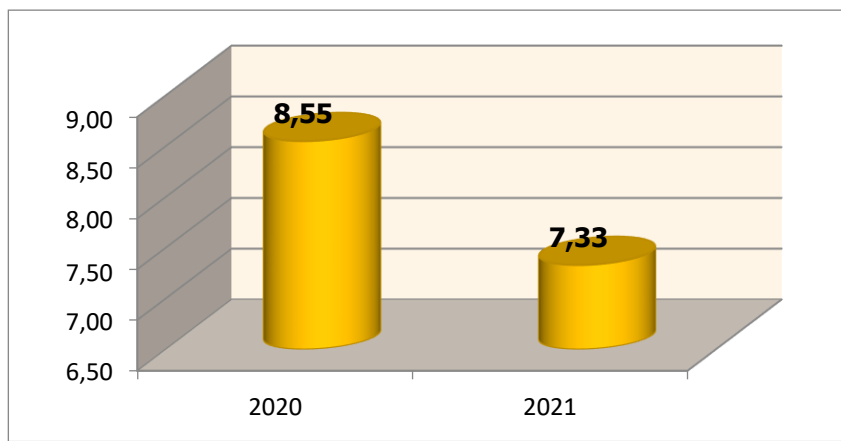
Gambar 2.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Administrasi Jakarta Selatan periode tahun 2017-2021

Sumber : Kota Jakarta Selatan Dalam Angka 2022

Gambar 2.4 menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Administrasi Jakarta Selatan mengalami trend peningkatan tiap tahunnya. Pada tahun 2017 sebesar 84,13 persen; tahun 2018 sebesar 84,44 persen;

tahun 2019 sebesar 84,75 persen; tahun 2020 sebesar 84,72 persen; dan pada tahun 2021 sebesar 84,90 persen. Capaian IPM ini termasuk dalam klasifikasi sangat tinggi ($IPM \geq 80$). Peningkatan IPM ini merupakan bukti kerja nyata Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam mensejahterakan masyarakatnya.

Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Administrasi Jakarta Selatan tahun 2020-2021 sebagai berikut:



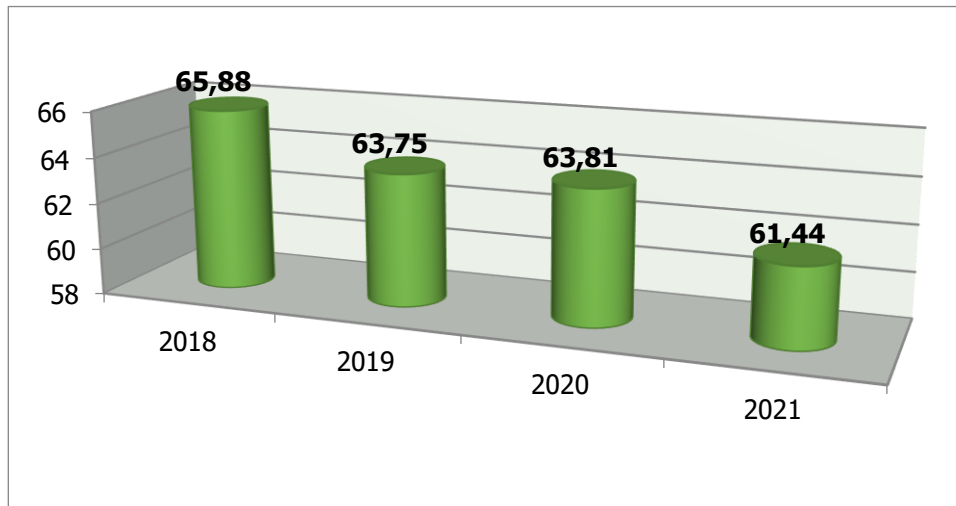
Gambar 2.5 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Administrasi Jakarta Selatan tahun 2020-2021

Sumber : Kota Jakarta Selatan Dalam Angka 2022

Gambar 2.5 menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Administrasi Jakarta Selatan tahun 2020-2021 mengalami trend penurunan sebesar 1,22 persen. Hal ini menunjukkan kemampuan ekonomi Kota

Administrasi Jakarta Selatan untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (supply) tenaga kerja yang ada.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Administrasi Jakarta Selatan tahun 2020-2021 sebagai berikut:

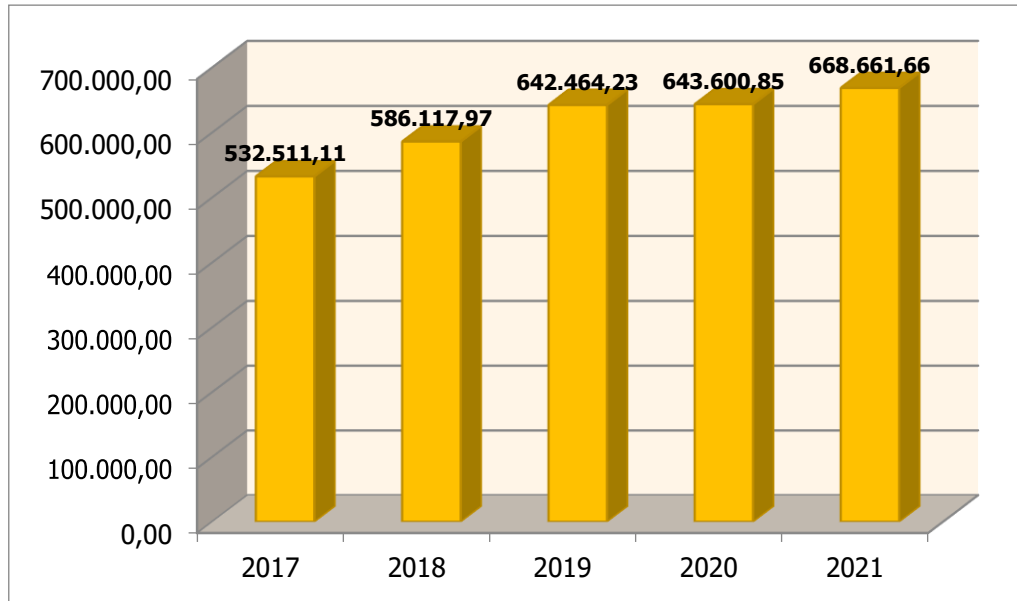


Gambar 2.6 Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2020-2021
Sumber : Kota Jakarta Selatan Dalam Angka 2022

Gambar 2.6 menunjukkan bahwa Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Administrasi Jakarta Selatan pada tahun 2018 sebesar 65,88%; tahun 2019 sebesar 63,75%; tahun 2020 sebesar 63,81%; dan pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi sebesar 61,44%. Hal ini memberikan informasi bahwa dari 100 orang penduduk usia kerja, hampir sebesar 61 orang diantaranya adalah angkatan kerja, sedangkan sekitar 39 persen adalah bukan angkatan kerja. Adanya peningkatan bukan angkatan kerja menjadikan Kota Administrasi Jakarta Selatan harus meningkatkan dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi warganya.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) nominal Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menunjukkan kemampuan Kota Administrasi Jakarta Selatan memanfaatkan sumber daya ekonominya. Dari sisi pengeluaran, PDRB ADHB menggambarkan total penggunaan seluruh konsumen akhir barang dan jasa. Kota Administrasi Jakarta Selatan mempunyai peranan yang besar

terhadap perekonomian DKI Jakarta. Adapun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) nominal Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) :



Gambar 2.7 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Jakarta Selatan (miliar rupiah), 2017–2021
Sumber : Kota Administrasi Jakarta Selatan Dalam Angka 2022

Pada Gambar 2.7 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Administrasi Jakarta Selatan tahun 2017–2021 menunjukkan bahwa tahun 2017 sebesar 532.511,11 miliar rupiah; tahun 2018 sebesar 586.117,97 miliar rupiah; tahun 2019 sebesar 642.464,23 miliar rupiah; tahun 2020 sebesar 643.600,85 miliar rupiah; dan pada tahun 2021 sebesar 668.661,66 miliar rupiah. Adapun tiga lapangan usaha penyumbang terbesar PDRB tahun 2021 yaitu : (1) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 15,78%; (2) Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 14,08%; dan (3) Informasi dan Komunikasi sebesar 12,74%. Dengan demikian, Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Administrasi Jakarta Selatan mengalami tren peningkatan tiap tahunnya.

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran di Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2016-2020 sebagai berikut:

Tabel 2.2 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kota Jakarta Selatan Tahun 2016-2020 (Milliar Rupiah)

No	Komponen Pengeluaran	Tahun				
		2016	2017	2018	2019*	2020**
1.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	317,015	347,137	379,763	415,437	418,534
2.	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	10,714	12,376	13,838	15,943	15,672
3.	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	91,673	97,280	112,416	114,545	132,514
4.	Pembentukan Modal Tetap Bruto	182,823	202,281	223,526	230,932	213,709
5.	Perubahan Inventori	(507)	1,463	3,763	278	(5,721)
6.	Net Ekspor/Impor	(118,447)	(128,026)	(147,188)	(134,525)	(130,135)
	Total	483,271	532,511	586,118	642,609	644,572

Sumber : PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kota Jakarta Selatan Tahun 2016-2020

Keterangan :

LNPRT = Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga

* = Angka Sementara

** = Angka Sangat Sementara

Tabel 2.2 di atas menunjukkan bahwa perkembangan PDRB Jakarta Selatan atas dasar harga berlaku selama tahun 2016 hingga 2020 memiliki trend positif. Pada tahun 2020, dari enam komponen PDRB pengeluaran, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) mempunyai nilai yang paling besar, yaitu Rp 418,53 triliun. Komponen lain yang mempunyai nilai besar adalah komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dengan nilai sebesar Rp 213,71 triliun rupiah. Komponen yang memiliki nilai tertinggi ketiga setelah PMTB adalah Pengeluaran Konsumsi Pemerintah. Nilainya pada tahun 2020 sebesar Rp 132,51 triliun rupiah, naik 15,69 persen dibandingkan tahun 2019. Pada tahun 2020, Jakarta Selatan menciptakan nilai PDRB sebesar Rp 644,57 triliun rupiah, atau 23,25 persen terhadap perekonomian DKI Jakarta.

Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kota Jakarta Selatan Tahun 2016-2020, terdapat pada Tabel 2.3 di bawah ini.

Tabel 2.3 Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kota Jakarta Selatan Tahun 2016-2020 (Persen)

No	Komponen Pengeluaran	Tahun				
		2016	2017	2018	2019*	2020**
1.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	65,60	65,19	64,79	64,65	64,93
2.	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	2,22	2,32	2,36	2,48	2,43
3.	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	18,97	18,27	19,18	17,82	20,56
4.	Pembentukan Modal Tetap Bruto	37,83	37,99	38,14	35,94	33,16
5.	Perubahan Inventori	-0,10	0,27	0,64	0,04	0,89
6.	Net Ekspor/Impor	(24,51)	(24,04)	(25,11)	(20,93)	(20,19)
	Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kota Jakarta Selatan Tahun 2016-2020

Tabel 2.3 di atas menunjukkan bahwa selama 5 tahun terakhir, struktur ekonomi Jakarta Selatan tidak mengalami perubahan yang signifikan. Hal ini dapat ditinjau dari sisi PDRB pengeluaran yang didorong oleh permintaan domestik. Permintaan domestik terbesar berasal dari Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT). Selama periode 2016-2020, kontribusinya selalu di atas 60 persen. Pada tahun 2020, kontribusi PKRT terhadap PDRB pengeluaran Jakarta Selatan mencapai 64,93 persen. Komponen terbesar kedua pada tahun 2020 setelah PKRT adalah Komponen PMTB. Kontribusi komponen ini mencapai 33,16 persen pada 2020, mengalami penurunan sebesar 2,78 poin dibandingkan tahun 2019.

Penurunan kontribusi pada komponen ini dikarenakan menurunnya investasi dalam bentuk bangunan di Jakarta Selatan. Keterbatasan lahan di Jakarta Selatan menjadi salah satu hal yang menyebabkan kondisi tersebut. Hal yang cukup menarik dicermati yaitu komponen net ekspor/imporsebagai faktor pengurang perekonomian Jakarta Selatan. Berdasarkan data tahun 2020, terlihat adanya penurunan kontribusi net ekspor/impor sebesar 0,74 poin. Sebagian besar impor Jakarta Selatan merupakan komoditas yang berupa barang. Salah satu penyebab penurunan kontribusi tersebut adalah berkurangnya impor luar negeri, artinya kemampuan ekonomi domestik untuk memenuhi kebutuhannya semakin tinggi.

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang diturunkan dari PDRB atas dasar harga konstan. Indikator ini menunjukkan proses kenaikan PDRB secara riil. Pertumbuhan ekonomi juga menggambarkan secara kasar kenaikan taraf hidup yang diukur dengan peningkatan output riilnya. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah tidak akan banyak berarti apabila tidak bisa selaras dengan pertumbuhan penduduknya. Konsekuensinya, pertumbuhan ekonomi seharusnya berada di atas pertumbuhan jumlah penduduknya.

Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran, Kota Jakarta Selatan Tahun 2016-2020 sebagai berikut:

Tabel 2.4 Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran, Kota Jakarta Selatan Tahun 2016-2020 (Persen)

No	Komponen Pengeluaran	Tahun				
		2016	2017	2018	2019*	2020**
1.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	5,62	5,68	5,94	5,93	(1,88)
2.	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	11,66	12,08	8,31	11,49	(4,02)
3.	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1,98	3,20	14,71	(1,18)	15,48
4.	Pembentukan Modal Tetap Bruto	1,79	6,10	4,50	1,39	(6,77)
5.	Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6.	Net Ekspor/Impor	(6,18)	3,96	9,64	(13,48)	(9,42)
	Total	6,11	6,30	6,24	6,81	(0,47)

Sumber : PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kota Jakarta Selatan Tahun 2016-2020

Tabel 2.4 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Jakarta Selatan cenderung meningkat selama periode 2016-2019, tetapi menurun pada tahun 2020. Pada tahun 2019 perekonomian Jakarta Selatan tumbuh 6,81 persen, lebih cepat dibandingkan tahun 2018 yang tumbuh sebesar 6,24 persen. Pertumbuhan pada tahun 2019 didorong oleh meningkatnya konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) yang dipengaruhi oleh penyelenggaraan pemilihan umum presiden pada April 2019.

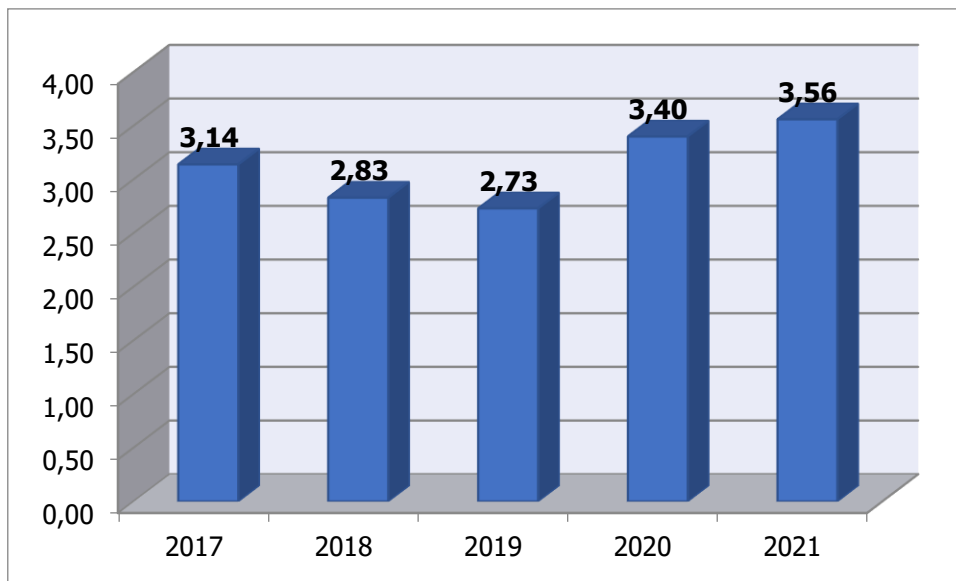
Peningkatan konsumsi ini cukup terasa di Jakarta Selatan disebabkan beberapa kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) partai politik berkantor di Jakarta Selatan. Ditambah lagi,

kantor Dewan Perwakilan Pusat (DPP) Partai Gerindra terletak di Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Sementara itu, pada tahun 2020 ini pertumbuhan ekonomi Jakarta Selatan menurun menjadi -0,47 persen. Hampir semua komponen mengalami penurunan, hanya komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah yang mengalami peningkatan. Penurunan terbesar terjadi pada komponen net ekspor/impor sebesar 9,42 persen. Selanjutnya, adalah komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang mengalami penurunan sebesar 6,77 persen. Pada tahun 2020, hanya komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP) yang mengalami pertumbuhan sebesar 15,48 persen.

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) secara langsung dapat mempengaruhi kondisi ekonomi Kota Administrasi Jakarta Selatan. Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 200 Tahun 2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Sementara Usaha Mikro/Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2021 dan Pencabutan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 44 Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Sementara Usaha Mikro/Pedagang Kaki Lima Pada Area di Bawah Fly Over Jalan KH. Abdullah Syafe'i Stasiun Tebet Dalam Rangka Penataan Kawasan Stasiun Tebet Kota Administrasi Jakarta Selatan. Lokasi Sementara (Loksem) berjumlah 48 dengan jumlah PKL sebanyak 1.924 PKL. Lokasi tersebut berbentuk semi permanen. Untuk memajukan pelaku usaha menengah, kecil, dan mikro (UMKM) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengembangkan Jakpreneur. Jakpreneur adalah platform kreasi, fasilitas dan kolaborasi pengembangan UMKM melalui ekosistem kewirausahaan, seperti start-up, institusi pendidikan, maupun institusi pembiayaan. Jakpreneur dapat berbentuk kerja sama jangka panjang maupun bentuk kegiatan lainnya, yang berpotensi untuk mengembangkan keterampilan dan kemandirian

berusaha. Berdasarkan Data P1 (pendaftaran) untuk jumlah pelaku UMKM di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang tergabung dalam Jakpreneur pada tahun 2021 sebanyak 20.074 UMKM, sedangkan untuk tahun 2020 yang berjumlah 14.478 UMKM.

Kondisi kesejahteraan masyarakat di Kota Administrasi Jakarta Selatan ditunjukkan dengan informasi angka kemiskinan, dan pengeluaran per kapita, dan koefisien gini. Adapun datanya sebagai berikut:



Gambar 2.8 Persentase Penduduk Miskin di Kota Jakarta Selatan Tahun 2017–2021

Sumber : Kota Administrasi Jakarta Selatan Dalam Angka 2022

Sejak tahun 2017 hingga sebelum pandemi, tingkat kemiskinan Kota Administrasi Jakarta Selatan berada pada tren menurun. Kenaikan tingkat kemiskinan mulai terjadi pada tahun 2020, hal ini disebabkan Pandemi Covid-19. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2019 sebesar 2,73 persen, meningkat menjadi 3,4 persen pada tahun 2020. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2021 naik kembali menjadi 3,56. Kenaikan tingkat kemiskinan menjadikan catatan khusus Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Garis Kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan non makanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata

pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Data mengenai Garis Kemiskinan Kota Administrasi Jakarta Selatan pada tahun 2017 sebesar 620.712 rupiah/kapita/bulan; tahun 2018 sebesar 680.167 rupiah/kapita/bulan; tahun 2019 sebesar 729.256 rupiah/kapita/bulan; tahun 2020 sebesar 782,7 rupiah/kapita/bulan. Jakarta Selatan memiliki garis kemiskinan tertinggi dengan Rp782.731,00 kapita per bulan. Nilai ini menunjukkan bahwa biaya hidup di Jakarta Selatan tertinggi dibandingkan dengan wilayah administrasi lainnya. Pandemi Covid-19 menjadikan sulitnya pemulihan daya beli penduduk, yang akan menyulitkan pula bagi penduduk miskin untuk melewati garis kemiskinan. Selama pandemi Covid-19, Dinsos Kota Administrasi Jakarta Selatan berperan aktif dalam memberikan bantuan sosial seperti sembako dan uang tunai kepada penduduk yang terdampak langsung dari pandemi ini.

Kondisi sarana dan prasarana ditinjau dari karakteristik Kota Administrasi Jakarta Selatan diantaranya :

1. Daerah Resapan Air;
2. Kawasan ekonomi prospektif di kawasan Segitiga;
3. Pengembangan kawasan bernilai sejarah di Kebayoran;
4. Kawasan perwakilan negara asing khususnya di Segitiga Kuningan, Sekretariat ASEAN, KPK, Mabes POLRI, Kantor Kementerian (Nakertrans, PU, Hukum dan HAM, Kesehatan, dsb);
5. Pengembangan pusat pembibitan dan penelitian tanaman dan perikanan;
6. Pengembangan kawasan Perkampungan Budaya Betawi sebagai lingkungan Cagar Budaya; dan Dikembangkannya Kawasan Kemang dan Manggarai; Penataan Kawasan Mayestik.

Prasarana jalan Kota Administrasi Jakarta Selatan, panjang jalan pada tahun 2020 dengan total sepanjang 2.028.618 meter. Panjang jalan tersebut meliputi jalan tol sepanjang 28.800 meter, jalan negara sepanjang 13.661 meter, dan jalan provinsi sepanjang 1.986.157 meter. Luas jalan pada

tahun 2020 dengan total 12.643.872 m². Luas jalan tersebut meliputi jalan tol 691.200 m², jalan negara 192.554 m², dan jalan provinsi 11.760.118 m². Dengan demikian, dari segi prasarana jalan Kota Administrasi Jakarta Selatan diperlukan penambahan panjang dan luas jalan agar mengurangi kemacetan lalu lintas.

Sarana pendidikan di Kota Administrasi Jakarta Selatan pada tahun 2020-2021 untuk TK sebanyak 415 unit, sedangkan tahun 2021-2022 sebanyak 408 unit, mengalami pengurangan sebanyak 7 unit. Raudatul Athfal (RA) pada tahun 2020-2021 dan tahun 2021-2022 sebanyak 233 unit. SD pada tahun 2020-2021 dan tahun 2021-2022 sebanyak 488 unit. Madrasah Ibtidaiyah (MI) pada tahun 2020-2021 dan tahun 2021-2022 sebanyak 140 unit. SMP pada tahun 2020-2021 sebanyak 217 unit, sedangkan tahun 2021-2022 sebanyak 222 unit, mengalami penambahan sebanyak 5 unit. Madrasah Tsanawiyah (MTs) pada tahun 2020-2021 dan tahun 2021-2022 sebanyak 66 unit. SMA pada tahun 2020-2021 sebanyak 104 unit, sedangkan tahun 2021-2022 sebanyak 103 unit, mengalami pengurangan sebanyak 1 unit. SMK pada tahun 2020-2021 sebanyak 128 unit, sedangkan tahun 2021-2022 sebanyak 127 unit, mengalami pengurangan sebanyak 1 unit. Madrasah Aliyah (MA) pada tahun 2020-2021 dan tahun 2021-2022 sebanyak 27 unit. Perguruan Tinggi pada tahun 2020-2021 sebanyak 51 unit, sedangkan tahun 2021-2022 sebanyak 48 unit, mengalami pengurangan sebanyak 3 unit. Dengan demikian, dari segi sarana pendidikan di Kota Administrasi Jakarta Selatan diperlukan penambahan gedung sekolah TK, SMA dan SMK negeri maupun swasta serta Perguruan Tinggi.

Sarana kesehatan di Kota Administrasi Jakarta Selatan diantaranya rumah sakit pada tahun 2019 dan tahun 2020 sebanyak 37 unit, sedangkan tahun 2021 sebanyak 34 unit, mengalami pengurangan sebanyak 3 unit. Rumah sakit bersalin pada tahun 2019 sebanyak 27 unit, tahun 2020 sebanyak 24 unit, sedangkan tahun 2021 sebanyak 15 unit, mengalami pengurangan

tahun 2019-2020 sebanyak 3 unit, pengurangan tahun 2020-2021 sebanyak 9 unit. Poliklinik pada tahun 2019 dan tahun 2020 sebanyak 58 unit, sedangkan tahun 2021 sebanyak 55 unit, mengalami pengurangan sebanyak 3 unit. Puskesmas pada tahun 2019 sebanyak 65 unit, tahun 2020 sebanyak 63 unit, sedangkan tahun 2021 sebanyak 60 unit, mengalami pengurangan tahun 2019-2020 sebanyak 2 unit, pengurangan tahun 2020-2021 sebanyak 3 unit. Puskesmas Pembantu tahun 2020 sebanyak 1 unit, sedangkan tahun 2021 sebanyak 8 unit, mengalami penambahan sebanyak 7 unit. Dengan demikian, dari segi sarana kesehatan di Kota Administrasi Jakarta Selatan diperlukan penambahan rumah sakit, rumah sakit bersalin, poliklinik, puskesmas. Hal ini dilakukan dalam menangani penyebaran pandemi Covid-19.

Sarana pembuangan sampah di Kota Administrasi Jakarta Selatan pada tahun 2021 sebanyak 190 titik lokasi yang tersebar di seluruh kecamatan. Titik lokasi pembuangan sampah berupa bak beton, dipo, lintas, pool container, pool gerobak, TPS, dan TPS reduce, reuse, dan recycle (3R). Jumlah kendaraan operasional angkutan sampah pada tahun 2021 sebanyak 313 unit yang terdiri dari berbagai moda angkutan. Semua sarana angkutan tersebut digunakan untuk mengangkut timbulan sampah yang mencapai 454.261.78 ton pada tahun 2020. Rata-rata volume sampah sungai sebesar 109,25 m³. Ritasi truk sampah yang terbanyak yaitu dari Jakarta Selatan (7.239). Tercatat pada tahun 2019 jumlah ritasi trucksampah yang masuk ke TPST sebanyak 36.991 ritasi dengan sampah 205 ribu ton sampah setiap bulannya. Artinya, setiap truk sampah membawa sampah sekitar 5,6 ton sampah setiap bulannya.

Sarana Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA) di Kota Administrasi Jakarta Selatan pada tahun 2021 sebanyak 61 unit. RPTRA kecamatan Tebet sejumlah 6 unit; kecamatan Setia Budi sejumlah 3 unit; kecamatan Mampang Prapatan sejumlah 1 unit; kecamatan Pasar Minggu sejumlah 11 unit; kecamatan Kebayoran Lama sejumlah 6 unit; kecamatan Cilandak

sejumlah 8 unit; kecamatan Kebayoran Baru sejumlah 3 unit; kecamatan Pancoran sejumlah 1 unit; kecamatan Jagakarsa sejumlah 14 unit; dan kecamatan Pesanggrahan sejumlah 8 unit. RPTRA terbanyak berada di kecamatan Jagakarsa sejumlah 14 unit. RPTRA di Kota Administrasi Jakarta Selatan sampai saat ini terus dikelola oleh masing-masing kecamatan.

Sarana hotel di Kota Administrasi Jakarta Selatan Pada tahun 2019, terdapat 148 hotel di Jakarta Selatan yang terdiri dari 101 hotel bintang dan 47 hotel non bintang. Jumlah kamar pada hotel berbintang sebanyak 13.604 kamar dengan jumlah tempat tidur sebanyak 19.065 buah. Sementara itu, jumlah kamar yang tersedia pada hotel non bintang tahun 2019 sebanyak 7.470 kamar dengan 7.749 buah tempat tidur.

Pada tahun 2020, terdapat 148 hotel yang terdiri dari 101 hotel bintang dan 47 hotel non bintang. Jumlah kamar pada hotel berbintang sebanyak 13.422 kamar, dan 18.038 buah tempat tidur. Sementara itu, jumlah kamar yang tersedia pada hotel non bintang tahun 2020 sebanyak 7.441 kamar dengan 2.469 buah tempat tidur.

Pada tahun 2021, terdapat 149 hotel yang terdiri dari 98 hotel bintang dan 51 hotel non bintang. Jumlah kamar pada hotel berbintang sebanyak 11.387 kamar, dan 15.871 buah tempat tidur. Sementara itu, jumlah kamar yang tersedia pada hotel non bintang tahun 2021 sebanyak 1.522 kamar dengan 1.802 buah tempat tidur. Dengan demikian, tahun 2019-2021 terjadi penurunan jumlah kamar dan tempat tidur di hotel wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Kota Administrasi Jakarta Selatan terdiri dari masyarakat yang heterogen, baik dari segi sosial, budaya, etnis dan agama. Etnis atau suku yang ada seperti Sunda, Jawa, Bugis, Madura dan lainnya. Betawi merupakan etnis asli di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Keragaman merupakan lambing kesatuan sehingga meskipun berbeda etnis, tidak menimbulkan konflik di masyarakat. Masyarakat berbagai etnis dapat hidup rukun dan berdampingan satu sama lainnya.

Warga binaan sosial di Kota Administrasi Jakarta Selatan pada tahun 2020 sebanyak 629 jiwa, yang ditampung dalam panti sosial berjumlah 11 unit.

Jumlah tempat peribadatan Kota Administrasi Jakarta Selatan pada tahun 2021 terdiri dari: Masjid sejumlah 735 unit; Mushola sejumlah 537 unit; Gereja Protestan sejumlah 204 unit; Gereja Katholik sejumlah 6 unit; Pura sejumlah 4 unit; dan Vihara sejumlah 7 unit. Jumlah Jamaah Haji yang diberangkatkan tahun 2019 yaitu 2.028 orang, sedangkan tahun 2020-2021 tidak ada, karena pandemi Covid-19.

Situasi dan kondisi ketentraman dan ketertiban umum yang sinergi dan kondusif merupakan salah satu modal meningkatkan daya saing antar daerah. Kondisi ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan indikator penertiban pelanggaran Perda, jumlah sengketa lahan yang diselesaikan, dan jumlah kriminalitas yang terjadi di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Pada tahun 2021 pelanggaran pemakaian masker mendominasi penertiban yang paling banyak dilakukan, mencapai 91.741 pelanggaran. Hal ini disebabkan kasus pandemi Covid-19 terutama varian Delta sangat masif penyebarannya dan banyak menimbulkan korban jiwa. Kesadaran masyarakat untuk melindungi diri dan orang lain terhadap pelaksanaan Perda masih diabaikan.

Sengketa pertanahan di Kota Administrasi Jakarta Selatan ditangani oleh Bagian Hukum. Penanganan sengketa pertanahan dilakukan secara mediasi oleh Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan antara kedua belah pihak yang bersengketa. Kasus sengketa biasanya antara masyarakat dengan masyarakat, antara masyarakat dengan lembaga atau institusi, dan antara lembaga atau institusi dengan lembaga atau institusi. Jumlah kasus sengketa pertanahan yang ditangani oleh Bagian Hukum dari tahun 2017-2021 sebanyak 203 kasus per tahun.

Kejadian kriminalitas di Kota Administrasi Jakarta Selatan pada tahun 2020 sebanyak 1761 kasus. Kasus kriminalitas yang paling sering terjadi yakni

narkotika, penipuan, demonstrasi, pencurian pemberatan, pencurian kendaraan bermotor, pencurian biasa, penganiayaan berat, pencurian kekerasan, penganiayaan ringan, pengrusakan, pembunuhan, perkosaan, pencurian ringan, pencurian dalam keluarga, dan penculikan.

Pada tahun 2020, jumlah Satlinmas di Kota Administrasi Jakarta Selatan sebanyak 1.023 petugas dengan jumlah linmas per 10.000 penduduk. Jumlah ini menunjukkan bahwa sebanyak empat sampai dengan lima petugas linmas untuk 10.000 penduduk di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Cakupan petugas linmas di DKI Jakarta tahun 2020 mencapai 0,16 orang per RT dari target nasional satu orang setiap RT. Hal ini disebabkan oleh adanya perumahan yang menggunakan jasa pengamanan swasta dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat di wilayah tersebut, sehingga tidak dimasukkan dalam jumlah Satlinmas.

Satpol PP yang berstatus kepegawaian sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebesar 29,96% atau sebanyak 1.595 orang di DKI Jakarta pada tahun 2020. Dari sebanyak 1.595 pegawai Satpol PP yang berstatus PTT, sebesar 23,00% atau sebanyak 374 Satpol PP berada di Jakarta Selatan. Rasio Satpol PP per 10.000 penduduk pada tahun 2020 sebesar 5,19. Angka ini menunjukkan bahwa terdapat lima Satpol PP yang melayani 10.000 penduduk Kota Administrasi Jakarta Selatan.

II.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kota Administrasi Jakarta Selatan

Sebagaimana Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi, Kota Administrasi Jakarta Selatan berkedudukan sebagai unsur pembantu Gubernur dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Camat dan Lurah serta mengoordinasikan, memantau dan mengawasi operasional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan. Dalam kedudukannya sebagai unsur

pembantu Gubernur, Kota Administrasi Jakarta Selatan mempunyai tugas, fungsi dan struktur organisasi sebagai berikut.

II.1.1 Tugas

Kota Administrasi Jakarta Selatan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Jakarta Selatan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat di wilayah Jakarta Selatan, membina kecamatan dan kelurahan serta melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Gubernur.

II.1.2 Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok di atas, Kota Administrasi Jakarta Selatan memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Kota Administrasi;
- b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Kota Administrasi;
- c. penetapan keputusan taktis operasional pelaksanaan tugas pemerintahan di wilayah Kota Administrasi;
- d. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayahnya;
- e. pelaksanaan pemberdayaan kelembagaan masyarakat di wilayahnya;
- f. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- g. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
- h. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- i. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kota administrasi;
- j. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kecamatan dan Kelurahan;
- k. pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal;

- l. pemantauan dan pemetaan situasi dan kondisi wilayah Kota Administrasi;
- m. pelaksanaan dan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah tingkat wilayah Kota Administrasi;
- n. pelaksanaan koordinasi dengan Dewan Kota;
- o. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang Kota Administrasi;
- p. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Kota Administrasi;
- q. pengelolaan kearsipan, data, dan informasi Kota Administrasi; dan
- r. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kota Administrasi.

Selain melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, Kota Administrasi Jakarta Selatan melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Gubernur untuk menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, meliputi :

- 1. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- 2. kesehatan;
- 3. sosial;
- 4. pemberdayaan masyarakat;
- 5. ketenteraman dan ketertiban umum; dan
- 6. koperasi, usaha kecil, dan menengah.

II.1.3 Struktur Organisasi Kota Administrasi Jakarta Selatan

Struktur Organisasi Kota Administrasi Jakarta Selatan terdiri dari :

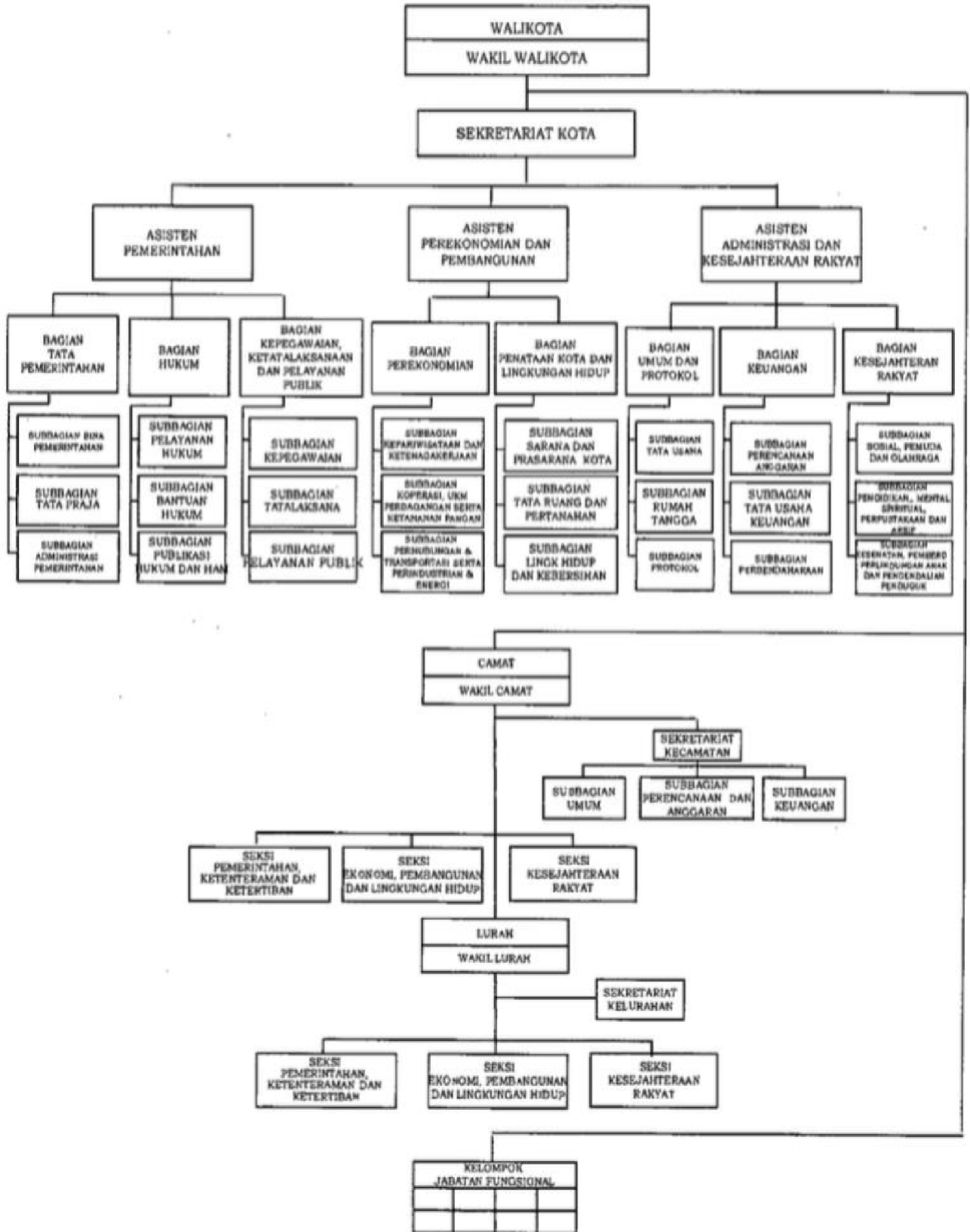
- a. Walikota
- b. Wakil Walikota
- c. Sekretariat Kota, terdiri dari :
 - 1. Asisten Pemerintahan, terdiri dari :
 - a) Bagian Tata Pemerintahan, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Bina Pemerintahan;
 - 2) Subbagian Tata Praja; dan

- 3) Subbagian Administrasi Pemerintahan.
 - b) Bagian Hukum, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Pelayanan Hukum;
 - 2) Subbagian Bantuan Hukum; dan
 - 3) Subbagian Publikasi Hukum dan HAM.
 - c) Bagian Kepegawaian, Tatalaksana dan Pelayanan Publik, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Kepegawaian;
 - 2) Subbagian Tatalaksana; dan
 - 3) Subbagian Pelayanan Publik.
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari :
- a) Bagian Perekonomian, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Kepariwisata dan Ketenagakerjaan;
 - 2) Subbagian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan serta Ketahanan Pangan; dan
 - 3) Subbagian Perhubungan serta Perindustrian dan Energi.
 - b) Bagian Penataan Kota dan Lingkungan Hidup, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Sarana dan Prasarana Kota;
 - 2) Subbagian Tata Ruang dan Pertanahan; dan
 - 3) Subbagian Lingkungan Hidup dan Kebersihan.
3. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
- a) Bagian Umum dan Protokol, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Tata Usaha;
 - 2) Subbagian Rumah Tangga; dan
 - 3) Subbagian Protokol.
 - b) Bagian Keuangan, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Perencanaan dan Anggaran;
 - 2) Subbagian Tata Usaha Keuangan; dan
 - 3) Subbagian Perbendaharaan.
 - c) Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :

- 1) Subbagian Sosial, Pemuda dan Olahraga;
 - 2) Subbagian Pendidikan, Mental, Spiritual, Perpustakaan dan Arsip; dan
 - 3) Subbagian Kesehatan, Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk.
- d. Kecamatan, terdiri dari :
1. Camat;
 2. Wakil Camat;
 3. Sekretariat Kecamatan, terdiri dari :
 - a) Subbagian Umum;
 - b) Subbagian Perencanaan dan Anggaran; dan
 - c) Subbagian Keuangan.
 4. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban;
 5. Seksi Kesejahteraan Rakyat; dan
 6. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup.
 7. Kelurahan, terdiri dari :
 - a) Lurah;
 - b) Wakil Lurah;
 - c) Sekretariat Kelurahan;
 - d) Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban;
 - e) Seksi Kesejahteraan Rakyat; dan
 - f) Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kota Administrasi Jakarta Selatan saat ini sedang menyusun draft pergub tentang Organisasi dan Tata Praja Kota Administrasi pasca kebijakan penyederhanaan birokrasi lingkup Pemprov DKI Jakarta dengan dialihkannya beberapa jabatan eselon IV menjadi jabatan fungsional muda sebagai subkoordinator.

Penjelasan lebih lanjut tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja sesuai Peraturan Gubernur Nomor 286 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi, pada Gambar 2.9 di bawah ini.



Gambar 2.9 Struktur Organisasi Kota Administrasi Jakarta Selatan
 Sumber : Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 Tentang Organisasi Tata Kerja Kota Administrasi

II.2 Sumber Daya Kota Administrasi Jakarta Selatan

II.2.1 Sumber Daya Manusia Kota Administrasi Jakarta Selatan

Pegawai Kota Administrasi Jakarta Selatan dan jajarannya, sampai dengan tahun 2022 sebanyak 127 orang dengan profil demografi dapat dijelaskan di bawah ini.

II.2.1.1 Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

Pegawai Kota Administrasi Jakarta Selatan berdasarkan kelompok umur, terdapat pada Tabel 2.5 di bawah ini.

Tabel 2.5 Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur Sekretariat Kota

No.	Unit Kerja	Usia (Tahun)						Jumlah	
		20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50		>50
1	Walikota						1	1	
2	Wakil Walikota							0	
3	Sekretaris Kota						1	1	
4	Asisten Pemerintahan							1	
5	Bagian Tata Pemerintahan		4	3	5		3	2	17
6	Bagian Hukum		1	1	3	2	1	7	15
7	Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik		1	3	2	3	3	2	14
8	Asisten Perekonomian dan Pembangunan						1		1
9	Bagian Perekonomian		1	3	3	1	2		10
10	Bagian Pembangunan dan LH	2		2	1	2	4	4	15
11	Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat							1	1
12	Bagian Umum dan Protokol	1	1	2	5	3	8	7	27
13	Bagian Keuangan			2	1	2	2	1	8
14	Bagian Kesejahteraan Rakyat			1	1	1	3	10	16
Total		3	8	17	21	14	29	35	127
Persentase (%)		2,36	6,30	13,39	16,54	11,02	22,83	27,56	100,00

Sumber : Bagian Kepegawaian, Tatalaksana dan Pelayanan Publik Kota Administrasi Jakarta Selatan, 2022

Tabel 2.5 menunjukkan bahwa jumlah pegawai Kota Administrasi Jakarta Selatan berdasarkan kelompok umur lebih dari 50 tahun sebanyak 35 orang (27,56%); 46-50 tahun sebanyak 29 orang (22,83%); 36-40 tahun sebanyak 21 orang (16,54%); 31-35 tahun sebanyak 17 orang (13,39%); 41-45 tahun sebanyak 14 orang (11,02%); 26-30 tahun sebanyak 8 orang (6,30%); dan 20-25 tahun sebanyak 3 orang (2,36%). Dengan demikian, berdasarkan kelompok umur pegawai Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang terbanyak lebih dari 50 tahun (35 orang atau 27,56%), sedangkan yang sedikit umur 20-25 tahun (3 orang atau 2,36%).

Pegawai kecamatan dan kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Selatan berdasarkan kelompok umur, terdapat pada Tabel 2.6 di bawah ini.

Tabel 2.6 Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur Kecamatan dan Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Selatan

No	Unit Kerja	Usia (tahun)							Jumlah
		20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50	
1	Setko	3	8	17	21	14	29	35	127
2	Kecamatan		3	23	27	14	21	59	147
3	Kelurahan	8	20	79	119	71	97	213	607
Total		11	31	119	167	99	147	307	881
Persentase (%)		1,25	3,52	13,51	18,96	11,24	16,69	34,85	100,00

Sumber : Bagian Kepegawaian, Tatalaksana dan Pelayanan Publik Kota Administrasi Jakarta Selatan, 2022

Tabel 2.2 menunjukkan bahwa jumlah pegawai kecamatan dan kelurahan Kota Administrasi Jakarta Selatan berdasarkan kelompok umur lebih dari 50 tahun sebanyak 307 orang (34,85%); 36-40 tahun sebanyak 167 orang (18,96%); 46-50 tahun sebanyak 147 orang (16,69%); 31-35 tahun sebanyak 119 orang (13,51%); 41-45 tahun sebanyak 99 orang (11,24%); 26-30 tahun sebanyak 31 orang (3,52%); dan 20-25 tahun sebanyak 11 orang (1,25%). Dengan demikian, berdasarkan kelompok umur pegawai kecamatan dan kelurahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang terbanyak lebih dari 50 tahun (307 orang atau 34,85%), sedangkan yang sedikit umur 20-25 tahun (11 orang atau 1,25%).

Berdasarkan penjelasan di atas, secara umum pegawai di Sekretariat Kota, Kecamatan dan Kelurahan berada dalam kategori usia produktif untuk memberikan pelayanan kepada warga di Wilayah Jakarta Selatan. Namun yang perlu diperhatikan adalah adanya pegawai yang akan memasuki masa pensiun (berumur >50 tahun) sehingga perlu disiapkan pegawai yang akan menggantikannya.

II.2.1.2 Jumlah Pegawai Menurut Golongan

Pegawai Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan berdasarkan golongan terdapat pada Tabel 2.7 di bawah ini.

Tabel 2.7 Jumlah Pegawai Menurut Golongan Sekretariat Kota

No.	Unit Kerja	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Walikota				1	1
2	Wakil Walikota					0
3	Sekretaris Kota				1	1
4	Asisten Pemerintahan				1	1
5	Bagian Pemerintahan		2	15		17
6	Bagian Hukum		2	10	3	15
7	Bagian KKPP	1		11	2	14
8	Asisten Perekonomian dan Pembangunan				1	1
9	Bagian Perekonomian	1	1	7	1	10
10	Bagian Penataan Kota dan LH	1	1	12	1	15
11	Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat				1	1
12	Bagian Umum dan Protokol		7	20		27
13	Bagian Keuangan			7	1	8
14	Bagian Kesejahteraan Rakyat		1	11	4	16
Total		3	14	93	17	127
Persentase (%)		2,36	11,02	73,23	13,39	100,00

Sumber : Bagian Kepegawaian, Tatalaksana dan Pelayanan Publik Kota Administrasi Jakarta Selatan, 2022

Berdasarkan Tabel 2.7 menunjukkan bahwa pegawai Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan yang menempati golongan III sebanyak 93 orang (73,23%); golongan IV sebanyak 17 orang (13,39%); golongan II sebanyak 14 orang (11,02%); dan golongan I sebanyak 3 orang (2,36%).

Dengan demikian, pegawai Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan yang terbanyak menempati golongan III sebanyak 93 orang (73,23%). Sedangkan yang sedikit golongan I sebanyak 3 orang (2,36%).

Pegawai kecamatan dan kelurahan Kota Administrasi Jakarta Selatan berdasarkan golongan terdapat pada Tabel 2.8 di bawah ini.

Tabel 2.8 Jumlah Pegawai Menurut Golongan Kecamatan dan Kelurahan

No	Unit Kerja	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Setko	3	14	93	17	127
2	Kecamatan	1	20	91	35	147
3	Kelurahan	15	113	461	18	607
Total		19	147	645	70	881
Persentase (%)		2,16	16,69	73,21	7,95	100,00

Sumber : Bagian Kepegawaian, Tatalaksana dan Pelayanan Publik Kota Administrasi Jakarta Selatan, 2022

Berdasarkan Tabel 2.8 menunjukkan bahwa pegawai kecamatan dan kelurahan Kota Administrasi Jakarta Selatan yang menempati golongan III sebanyak 645 orang (73,21%); golongan II sebanyak 147 orang (16,69%); golongan IV sebanyak 70 orang (7,93%); dan golongan I sebanyak 19 orang (2,16%).

Dengan demikian, pegawai kecamatan dan kelurahan yang terbanyak menempati golongan III (93 orang atau 73,23%). Sedangkan yang sedikit golongan I (3 orang atau 2,36%). Data tersebut menunjukkan 60 persen pegawai memiliki kesempatan untuk mengembangkan karir. Sehingga perlu dilakukan pembinaan pengembangan karir pegawai agar potensi pegawai dapat dikembangkan secara optimal.

II.2.1.3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Pegawai Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan berdasarkan tingkat pendidikan terdapat pada Tabel 2.9 di bawah ini.

Tabel 2.9 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Sekretariat Kota

No	Unit	Tingkat Pendidikan					Jumlah	
		SD	SMP	SMA/D1	D3	S1/D4		S2
1	Walikota						1	1
2	Wakil Walikota						0	0
3	Sekretaris Kota						1	1
4	Asisten Pemerintahan						0	1
5	Bagian Tata Pemerintahan			2		11	4	17
6	Bagian Hukum		1	2		8	4	15
7	Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik		1	1	3	7	2	14
8	Asisten Perekonomian dan Pembangunan						1	1
9	Bagian Perekonomian		1	1	1	5	2	10
10	Bagian Penataan Kota dan Lingkungan Hidup		1	2	1	10	1	15
11	Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat						1	1
12	Bagian Umum dan Protokol			11	1	13	2	27
13	Bagian Keuangan			1		5	2	8
14	Bagian Kesejahteraan Rakyat			5	3	6	2	16
Total		0	4	25	9	65	24	127
Persentase (%)		0	3,15	19,69	7,09	51,18	18,90	100,00

Sumber : Bagian Kepegawaian, Tatalaksana dan Pelayanan Publik Kota Administrasi Jakarta Selatan, 2022

Berdasarkan Tabel 2.9 menunjukkan bahwa pegawai Kota Administrasi Jakarta Selatan yang memiliki tingkat pendidikan S1/D4 sebanyak 65 orang (51,18%); SMA/D1 sebanyak 25 orang (19,69%); S2 sebanyak 24 orang (18,90%); D3 sebanyak 9 orang (7,09%); dan SMP sebanyak 5 orang (3,15%). Dengan demikian, berdasarkan tingkat pendidikan pegawai di Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan didominasi oleh tingkat pendidikan S1/D4 (65 orang atau 51,18%). Sedangkan tingkat pendidikan terendah pada SMP (5 orang atau 3,15%).

Pegawai kecamatan dan kelurahan Kota Administrasi Jakarta Selatan berdasarkan tingkat pendidikan terdapat pada Tabel 2.10 di bawah ini.

Tabel 2.10 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Kecamatan dan Kelurahan

No	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan						Jumlah
		SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	
1	Setko	0	4	25	9	65	24	127
2	Kecamatan	1	1	19	23	68	35	147
3	Kelurahan	9	15	131	98	311	43	607
Total		10	20	175	130	444	102	881
Persentase (%)		1,14	2,27	19,86	14,76	50,40	11,58	100,00

Sumber : Bagian Kepegawaian, Tatalaksana dan Pelayanan Publik Kota Administrasi Jakarta Selatan, 2022

Berdasarkan Tabel 2.10 menunjukkan bahwa pegawai kecamatan dan kelurahan Kota Administrasi Jakarta Selatan yang memiliki tingkat pendidikan S1 sebanyak 444 orang (50,40%); SMA sebanyak 175 orang (19,86%); D3 sebanyak 130 orang (14,76%); S2 sebanyak 102 orang (11,58%); SMP sebanyak 20 orang (2,27%); dan SD sebanyak 10 orang (1,14%). Dengan demikian, berdasarkan tingkat pendidikan pegawai di kecamatan dan kelurahan Kota Administrasi Jakarta Selatan didominasi oleh tingkat pendidikan S1 (444 orang atau 50,40%). Sedangkan tingkat pendidikan terendah pada SD (10 orang atau 1,14%).

Dapat disimpulkan bahwa secara umum pegawai Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kecamatan dan Kelurahan sudah baik karena diatas 50% pegawainya memiliki tingkat pendidikan akademik S1 ke atas. Dengan kata lain pegawai Kota Administrasi Jakarta Selatan telah memiliki (1) kemampuan mengingat informasi secara umum dan luas, dalam domain kognitif, (2) kemampuan menerjemahkan dan mengubah informasi ke dalam berbagai bentuk media (angka, kalimat, gambar), (3) kemampuan mengaplikasikan suatu informasi, konsep, teori atau metode memecahkan masalah, (4) kemampuan analisis untuk menjabarkan struktur persoalan sehingga mudah dipahami, (5) kemampuan sintesis dalam berfikir, dan (6) kemampuan melakukan penilaian berdasarkan suatu kriteria yang baku dengan metode ilmiah (Bloom, 1956).

II.2.1.4 Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

Jabatan struktural yang tersedia di Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai berikut.

Tabel 2.11 Jumlah Pegawai Menurut Jabatan Sekretariat Kota

No.	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	2
2	Eselon III	10
3	Eselon IV	5
4	Fungsional Tertentu	17
5	Fungsional Pelaksana	92
Total		126

Sumber : Bagian Kepegawaian, Tatalaksana dan Pelayanan Publik Kota Administrasi Jakarta Selatan, 1 Maret 2022

Berdasarkan Tabel 2.11 menunjukkan bahwa pegawai yang menempati eselon II sebanyak 2 orang, eselon III sebanyak 10 orang dan eselon IV sebanyak 5 orang, fungsional tertentu sebanyak 17 orang, sedangkan sisanya adalah fungsional pelaksana sebanyak 92 orang.

Jabatan struktural yang tersedia di kecamatan dan kelurahan Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai berikut.

Tabel 2.12 Jumlah Pegawai Menurut Jabatan Kecamatan dan Kelurahan

No	Unit Kerja	Eselon					Jumlah
		Fungsional Pelaksana (Staf)	Fungsional Tertentu	Eselon IV	Eselon III	Eselon II	
1	Kecamatan	65	0	54	25	0	186
2	Kelurahan	309	0	293	0	0	792
	Total	374	0	347	25	0	978

Sumber : Bagian Kepegawaian, Tatalaksana dan Pelayanan Publik Kota Administrasi Jakarta Selatan, 1 Maret 2022

Berdasarkan Tabel 2.12 menunjukkan bahwa pegawai yang menempati eselon III di kecamatan sejumlah 25 orang, eselon IV sejumlah 54 orang dan fungsional pelaksana sebanyak 65 orang. Adapun untuk eselon IV di kelurahan sejumlah 293 orang, kemudian untuk fungsional pelaksana di kelurahan sebanyak 309 orang.

II.2.2 Aset atau Modal Kota Administrasi Jakarta Selatan

II.2.2.1 Aset atau Modal

Aset atau modal berupa sarana dan prasarana yang dimiliki Kota Administrasi Jakarta Selatan diperlukan untuk mendukung tugas-tugas Kota Administrasi Jakarta Selatan, disamping sumber daya manusia yang telah di jelaskan di atas. Jenis aset atau modal (sarana dan prasarana) yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi peralatan kantor, bangunan, dan transportasi serta peralatan utama lainnya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kota Administrasi Jakarta Selatan khususnya dalam fungsi teknis.

Tabel 2.13 Jumlah Aset menurut Jenis pada Kota Administrasi Jakarta Selatan sampai dengan Tahun 2022

No.	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang	Kondisi		Ket
			Baik	Rusak Berat	
1.	Kendaraan roda 4	15	14	1	
2.	Kendaraan roda 2	20	11	9	
3.	Peralatan kantor	8552	8097	455	
4.	Bangunan	5	5	-	
5.	Tanah	74.747 m ²	-	-	

Sumber : Bagian Umum dan Protokol, 2022

Berdasarkan Tabel 2.13 menunjukkan bahwa kendaraan roda empat berjumlah 15 unit, kondisi baik sebanyak 14 unit, sedangkan kondisi rusak berat sebanyak satu unit. Kendaraan roda dua berjumlah 20 unit, kondisi baik sebanyak 11 unit, sedangkan kondisi rusak berat tidak ada. Peralatan kantor berjumlah 8552 unit, kondisi baik sebanyak 8097 unit, sedangkan kondisi rusak berat sebanyak 455 unit. Bangunan berjumlah 5 unit, kondisi baik sebanyak 5 unit, sedangkan kondisi rusak berat tidak ada. Tanah seluas 74.747 m². Dengan demikian, kondisi sarana prasarana di Kota Administrasi Jakarta Selatan telah memadai dalam menunjang kinerja organisasi. Lebih

lanjut, data aset khususnya aset tetap berupa peralatan dan mesin masih dalam keadaan baik.

Tabel 2.14 Jumlah Aset Tanah Kota Administrasi Jakarta Selatan sampai dengan Tahun 2022

No.	Jenis Barang	Ukuran	Alamat	Penggunaan
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan	1280 M ²	Jl. Citayam No. 1, Kelurahan Rawa Barat	Rumah Dinas Walikota Jakarta Selatan
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintahan	1380 M ²	Jl. Abdul Kahfi No. 11	Bangunan Kantor Pemerintahan
3	Tanah untuk Makam Hindu/Budha/China	4830 M ²	Jl. Delman Elok Enam, RT. 04, RW. 11	Makam Hindu/Budha/China
4	Tanah untuk Makam Hindu/Budha/China	1007 M ²	Jl. Nimun Raya (Jl. Inspeksi)	Makam Hindu/Budha/China
5	Tanah untuk Makam Hindu/Budha/China	2280 M ²	Jl. Bintaro Raya 7, RT. 012, RW. 010	Makam Hindu/Budha/China
6	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	35.194 M ²	Jl. Prapanca Raya No.9	Bangunan Kantor Pemerintah
7	Tanah Bangunan Rumah Sakit	28.776 M ²	Jl. Rengas Raya, RT. 005, RW. 011	Bangunan Rumah Sakit

Sumber : Bagian Umum dan Protokol Setko Administrasi Jakarta Selatan, 2022

Tabel 2.15 Jumlah Aset Gedung dan Bangunan Kota Administrasi Jakarta Selatan sampai dengan Tahun 2022

No.	Jenis Barang	Ukuran	Alamat	Kondisi	Bertingkat
1	Rumah Negara Golongan 1 Tipe A Permanen	468 M ²	Jl. Citayam No. 1	1	1
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	409 M ²	Jl. Abdul Kahfi No. 1	3	0
3	Bangunan Gedung Kantor Permanen	29.652 M ²	Jl. Prapanca Raya	1	17
4	Bangunan Gedung Kantor Permanen	49.915 M ²	Jl. Prapanca Raya	1	10
5	Bangunan Gedung Kantor Permanen	400 M ²	Jl. Prapanca Raya	1	17
6	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	300 M ²	Jl. Prapanca Raya	1	17
7	Pagar Permanen	500 M ²	Jl. Prapanca Raya	1	-
8	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	75 M ²	Jl. Prapanca Raya	1	-
9	Rambu Tanda Silang	10 Unit	Jl. Prapanca Raya	1	10

10	Rumah Panel	20 M ²	Jl. Citayam No. 1	1	-
11	Taman Permanen	200 M ²	Jl. Prapanca Raya	1	10
12	Taman Semi Permanen	1 M ²	Jl. Prapanca Raya	1	0

Sumber : Bagian Umum dan Protokol Setko Administrasi Jakarta Selatan, 2022

Tabel 2.16 Jumlah Aset/ Modal Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Selatan sampai dengan Tahun 2022

No.	Kecamatan/Kelurahan	Alamat	No Sertifikat	Luas	Jumlah Lantai
I.	Kecamatan Jagakarsa	Jl. Sirsak No.02, RT.5/RW.7, Jagakarsa, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan			4 Lapis
1	Kelurahan Ciganjur	Jl. Anda No IB, Kelurahan Ciganjur		927 M ²	3 Lapis
2	Kelurahan Cipedak	Jl. Pinding No. 1, Ciganjur, RT.1/RW.1, Cipedak, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan			3 Lapis
3	Kelurahan Jagakarsa	Jalan Jagakarsa II No. 1, RT.01 / RW.07, Jagakarsa, RT.1/RW.7, Jagakarsa, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan			3 Lapis
4	Kelurahan Lenteng Agung	Jl. Agung Raya I No.9, RW.2, Lenteng Agung, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan			3 Lapis
5	Kelurahan Srengseng Sawah	Jl. Raya Srengseng Sawah No. 8.			3 Lapis
6	Kelurahan Tanjung Barat	Jl. Sirsak No. 2, Kelurahan Jagakarsa			3 Lapis
II.	Kecamatan Pasar Minggu	Jl. Raya Ragunan, RT.6/RW.1, Jati Padang, Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan			4 Lapis
1	Kelurahan Cilandak Timur	Jl. Bhakti No.48 A, RT.3/RW.7, Cilandak Tim., Kec. Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan			3 Lapis
2	Kelurahan Jati Padang	Jl. Raya Ragunan RT 008/01, Jati Padang			3 Lapis
3	Kelurahan Kebagusan	Jl. Kebagusan Dalam IV RT 009/05 No. 1.			3 Lapis
4	Kelurahan Pasar Minggu	Jl. Raya Ragunan No. 16, Pasar Minggu			3 Lapis
5	Kelurahan Pejaten Barat	Jl. Komp. Bappenas Siaga Raya No.1, RT.12/RW.4, Pejaten Bar., Kec. Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan			3 Lapis
6	Kelurahan Pejaten Timur	Jalan Swadaya No.1, Pejaten Timur, RT. 006/RW.10, Pejaten Tim., Ps. Minggu,, RT.5/RW.10, Pejaten Tim., Kec. Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan			3 Lapis
7	Kelurahan Ragunan	Jl. Saco No.1, Ragunan, Pasar Minggu, RT.1/RW.4, Ragunan, Kec. Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan			3 Lapis
III.	Kecamatan Cilandak	Jl. KH Muhasyim Raya No. 1, RT. 14, RW. 06, Kelurahan Cilandak Barat			4 Lapis
1	Kelurahan Cilandak Barat	Jl. Terogong Raya No. 1, 11, 10, RT. 9, RW. 1C, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak		1500 M ² 225 M ² 420 M ²	1 Lapis 3 Lapis 1 Lapis
2	Kelurahan Cipete Selatan	Jl. Palembang No. 17 A, RT. 12, RW. 003, Kelurahan Cipete Selatan		900 M ² 700 M ²	3 Lapis

3	Kelurahan Gandaria Selatan	Jl. Mangga No.28B, RT.7/RW.4, Gandaria Sel., Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan			3 Lapis
4	Kelurahan Lebak Bulus	Jl. Manunggal Jaya No.30, RT.7/RW.4, Lb. Bulus, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan			3 Lapis
5	Kelurahan Pondok Labu	Jl. Swakarya Bawah No.1, RT.3/RW.9, Pd. Labu, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan			3 Lapis
IV.	Kecamatan Pesanggrahan	Jl. Pesanggrahan Raya No.2, RT.5/RW.3, Pesanggrahan, Kec. Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan			4 Lapis
1	Kelurahan Bintaro	Jl. RC. Veteran Raya No.4, RT.1/RW.3, Bintaro, Kec. Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan			3 Lapis
2	Kelurahan Pesanggrahan	Jl. Pesanggrahan Indah No.2, RT.5/RW.3, Pesanggrahan, Kec. Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan			3 Lapis
3	Kelurahan Petukangan Selatan	Jl. Damai PDK 1, No. 2, Kelurahan Petukangan Selatan			3 Lapis
4	Kelurahan Petukangan Utara	Jl. Mesjid Darul Falah No.1, RT.4/RW.3, Petukangan Utara, Kec. Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan			3 Lapis
5	Kelurahan Ulujami	Jl. Kelurahan Ulujami No.1, RT.1/RW.4, Ulujami, Kec. Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan			3 Lapis
V.	Kecamatan Kebayoran Lama	Jl. Cputat Raya No. 1 Kelurahan Kebayoran Lama Selatan	Sertifikat Hak Pakai No. 389 Tanggal 25 Maret 1981	2169 M ²	4 Lapis
1	Kelurahan Cipulir	Jl. Samudra No.1, RT.2/RW.11, Cipulir, Kec. Kby. Lama, Kota Jakarta Selatan			3 Lapis
2	Kelurahan Grogol Selatan	Jl. Rawa Simprug VIII No.1, RT.9/RW.10, Grogol Sel., Kec. Kby. Lama, Kota Jakarta Selatan			3 Lapis
3	Kelurahan Grogol Utara	Jl. Pulo Kemandoran No.99 1, RT.1/RW.11, Grogol Utara, Kec. Kby. Lama, Kota Jakarta Selatan			3 Lapis
4	Kelurahan Kebayoran Lama Selatan	Jl. Bungur No.1, RT.2/RW.2, Kby. Lama Sel., Kec. Kby. Lama, Kota Jakarta Selatan			3 Lapis
5	Kelurahan Kebayoran Lama Utara	Jl. Ciputat Raya No. 1 A, Kelurahan Kebayoran Lama Utara	Sertifikat Hak Pakai No. 389 Tanggal 25 Maret 1981	2169 M ²	3 Lapis
6	Kelurahan Pondok Pinang	Jl. Pd. Pinang VII No.RT.10, RT.10/RW.2, Pd. Pinang, Kec. Kby. Lama, Kota Jakarta Selatan			3 Lapis
VI.	Kecamatan Kebayoran Baru	Jalan Kerinci IX Blok E/1, RT.8/RW.2, Gunung, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan			3 Lapis
1	Kelurahan Cipete Utara	Jl. Sawo Dalam III No.10, RT.9/RW.7, Cipete Utara, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan			3 Lapis
2	Kelurahan Gandaria Utara	Jl. Radio Dalam VII, Kecamatan Kebayoran Baru		1.500 M ²	3 Lapis

3	Kelurahan Gunung	Jl. Bujana Dalam No. 7 RT 10 RW 01.			3 Lapis
4	Kelurahan Kramat Pela	Jl. Mendawai I No.88, RT.1/RW.7 Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru Kota, Jakarta Selatan			3 Lapis
5	Kelurahan Melawai	Jl. Wijaya IX No. 14. Wilayah Jakarta Selatan			3 Lapis
6	Kelurahan Petogogan	Jl. Wijaya Timur Raya No.116, RT.2/RW.2, Petogogan			3 Lapis
7	Kelurahan Pulo	Jl. Prapanca Raya No. 5, Jakarta Selatan			3 Lapis
8	Kelurahan Rawa Barat	Jl. Senayan No.30, RT.6/RW.6, Rw. Bar., Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan			3 Lapis
9	Kelurahan Selong	Jl. Limo No 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan			3 Lapis
10	Kelurahan Senayan	Jl. Tulodong Bawah VII, RT.2/RW.1, Senayan, Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan			3 Lapis
VII.	Kecamatan Mampang Prapatan	Jl. Mampang Prapatan XII, RT.3/RW.6, Tegal Parang, Mampang Prpt., Kota Jakarta Selatan			4 Lapis
1	Kelurahan Bangka	Jl. Kemang Tim. I No.1, RT.6/RW.4, Bangka, Kec. Mampang Prpt., Kota Jakarta Selatan			3 Lapis
2	Kelurahan Kuningan Barat	Jl. Kuningan Barat Raya No.1, RT.11/RW.1, Kuningan Bar., Kec. Mampang Prpt., Kota Jakarta Selatan			3 Lapis
3	Kelurahan Mampang Prapatan	Jl. Mampang Prapatan IV Gang Lurah No.8, RW.5, Mampang Prpt., Kec. Mampang Prpt., Kota Jakarta Selatan			3 Lapis
4	Kelurahan Pela Mampang	Jl. Bangka X No.1, RT.4/RW.7, Pela Mampang, Kec. Mampang Prpt., Kota Jakarta Selatan			3 Lapis
5	Kelurahan Tegal Parang	Jl. Tegal Parang Selatan V, No. 19 C, RT.8, RW. 4, Tegal Parang	Sertifikat Hak Pakai No. 00317 dan No. 28.	987 M ²	3 lapis
VIII	Kecamatan Pancoran	Jl. Pengadegan Timur II/2 Kecamatan Pancoran	IMB Nomor 5896/IMB/2012	2.259 M ²	4 Lapis
1	Kelurahan Cikoko	Jl. Cikoko Bar. III No.45, RT.5/RW.5, Cikoko, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan			3 Lapis
2	Kelurahan Duren Tiga	Jl. Guru Alip No.26, RT.5/RW.6, Duren Tiga, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan			3 Lapis
3	Kelurahan Kalibata	Jl. Kalibata Timur IV No.8, RT.10/RW.8, Kalibata, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan			3 Lapis
4	Kelurahan Pancoran	Jl. Pancoran Barat III No.55, RT.2/RW.4, Pancoran, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan			3 Lapis
5	Kelurahan Pengadegan	Jl. Pengadegan Timur 1 No 9d Pengadegan Pancoran Jaksel, RT.6/RW.1.			3 Lapis
6	Kelurahan Rawajati	Jl. Rawajati Bar. V No.37-47, RT.6/RW.4, Rawajati, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan			3 Lapis
IX	Kecamatan Tebet	Jl. Prof. DR. Soepomo No.16, RW.2, Tebet Bar., Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan			4 Lapis
1	Kelurahan Bukit Duri	Jl. Kp. Melayu Kecil 3 No.12, RW.9, Bukit Duri, Kec. Tebet			3 Lapis

2	Kelurahan Kebon Baru	Jl. Asem Baris Raya No.101, RT.9/RW.5, Kb. Baru, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan			3 Lapis
3	Kelurahan Manggarai Selatan	Jl. Rambutan No. IV/D, Kelurahan Manggarai Selatan			3 Lapis
4	Kelurahan Manggarai				
5	Kelurahan Menteng Dalam	Jl. Rasamala 1, RT. 003, RW. 002, Kelurahan Menteng Dalam		Tanah = 1.458 M ² Bangunan = 115 M ²	1 Lapis
6	Kelurahan Tebet Barat	Jl. Tebet Timur Dalam III M Jl. Tebet Raya No.1, RT.1/RW.3, Tebet Tim., Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan			3 Lapis
7	Kelurahan Tebet Timur	Jl. Tebet Timur Dalam III M Jl. Tebet Raya No.1, RT.1/RW.3, Tebet Tim., Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan			3 Lapis
X	Kecamatan Setiabudi	Jl. Setia Budi Barat No.8K, RT.3/RW.3, Kuningan, Setia Budi, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan			4 Lapis
1	Kelurahan Guntur	Jl. Tangkuban Perahu No.2, RT.8/RW.2, Guntur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan			3 Lapis
2	Kelurahan Karet Kuningan	Jl. Angrek 4 No.1, RT.6/RW.2, Kuningan, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan			3 Lapis
3	Kelurahan Karet Semanggi	Jl K.H Guru Mughni No. 1 Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan			3 Lapis
4	Kelurahan Karet	Jl. Karet Karya No.1, RT.5/RW.7, Kuningan, Karet, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan			3 Lapis
5	Kelurahan Kuningan Timur	Jl. Lapangan Tenis UMS, Karang Asem 2 No.3, RW.2, Kuningan, Kuningan Tim., Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan			3 Lapis
6	Kelurahan Menteng Atas	Jl. Menteng Pulo No.1, RW.1, Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan			3 Lapis
7	Kelurahan Pasar Manggis	Jl. Menteng Wadas Timur No.122, RW.1, Ps. Manggis, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan			3 Lapis
8	Kelurahan Setiabudi	Jl. Setia Budi Barat No.7, RT.3/RW.3, Kuningan, Setia Budi, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan			3 Lapis

Sumber : Bagian Umum dan Protokol Setko Administrasi Jakarta Selatan, 2022

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa asset atau modal Kota Admistrasi Jakarta Selatan terdiri dari 10 kecamatan dan 65 kelurahan. Bangunan kantor kecamatan terdiri dari empat lapis atau tingkat. Sedangkan bangunan kantor kelurahan tersidir dari tiga lapis atau tingkat.

II.2.2.2 Sarana dan Prasarana

Tugas dan fungsi Kota Administrasi Jakarta Selatan, disamping sumber daya manusia, anggaran, maka sarana dan prasarana yang baik dibutuhkan dalam menunjang kinerja pegawai. Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan input penting dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang di emban Kota Administrasi Jakarta Selatan. Jenis sarana dan prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi kendaraan operasional, gedung kantor dan rumah dinas, serta peralatan kantor. Saat ini kondisi sarana dan prasarana di Kota Administrasi Jakarta Selatan perlu terus ditingkatkan jumlah maupun kualitasnya, agar kinerja organisasi dalam melayani masyarakat semakin meningkat kualitasnya.

II.2.2.3 Lingkup Pelayanan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan kepada seluruh institusi pemerintahan, baik di tingkat pusat maupundaerah, untuk melakukan Survei Kepuasan Masyarakat sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan.

IKM merupakan salah satu tolak ukur bagi instansi pemerintah dalam melakukan evaluasi pelayanan yang diberikan pada masyarakat agar tetap prima. Hampir semua instansi pemerintah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat menjadikan IKM sangat penting untuk mendorong perubahan pelayanan menjadi lebih baik lagi.

Keberhasilan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas selalu menjadi tantangan bagi institusi pelayanan baik publik maupun swasta. Institusi pelayanan dituntut menjadi organisasi yang handal dimana seluruh elemen penggerak di dalam organisasi diberikan kebebasan untuk berdiskusi dan menjalankan standar yang menjadi kesepakatan sehingga konsistensi dalam proses pelayanan tetap terjaga. Implementasi dari pelayanan yang

dijalankan tersebut haruslah dipantau dan dievaluasi secara sistematis dan teratur.

Survei Kepuasan Masyarakat selain dimaksudkan untuk mengukur tingkat kepuasan, juga memungkinkan perbaikan pelayanan selain itu menjadi acuan bagi pemerintah pusat dan daerah untuk mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan publik sekaligus sebagai alat untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik. Melalui analisis kinerja dapat disusun prioritas perbaikan untuk meningkatkan kualitas layanan di Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Pengukuran yang berkesinambungan akan memungkinkan untuk mengetahui kinerja pelayanan masing-masing Kelurahan dan Kecamatan serta untuk memperoleh unsur pelayanan mana yang dianggap penting oleh masyarakat yang menjadi prioritas untuk diperbaiki kualitasnya dan adanya Indeks Kepuasan Masyarakat di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Walikota.

Pelayanan yang di berikan Kota Administrasi Jakarta Selatan secara umum termasuk pelayanan kecamatan dan kelurahan, diantaranya:

- a. Layanan Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU)
- b. Layanan Juru Pemantau Jentik (Jumantik)
- c. Layanan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)
- d. Layanan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
- e. Layanan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA).
- f. Layanan Ketertiban Umum (Tibum).

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat yang rencananya dilakukan dengan menggunakan 6 indikator yang terdiri dari PPSU, Ketertiban Umum, Posyandu, Jumantik, PKK dan RPTRA. Namun dikarenakan adanya Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan beberapa pelayanan tidak berjalan maksimal, maka hanya 2 indikator layanan yang dilakukan survei yaitu Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) dan Ketertiban Umum.

Melalui kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat ini, untuk terus mengevaluasi dan meningkatkan kualitas Pelayanan Publik maka dari itu Pemerintah Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan melalui Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan mengadakan Survei Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Kelurahan Tahun 2020. Survei Kepuasan Masyarakat tahun 2020 ini merupakan survei pertama yang dilakukan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan menggunakan Aplikasi JakSurvei.

Pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparatur, setiap tahunnya dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di seluruh kelurahan Kota Administrasi Jakarta Selatan. SKM menghasilkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diperlukan sebagai acuan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan publik sekaligus sebagai alat untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Tabel 2.17 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2018-2021

Tahun	Target	Realisasi IKM	Capaian (%)	Keterangan	Kategori
2021	86	91,28	106,14	Mencapai Target	Sangat Baik "A"
2020	86	87,47	101,71	Mencapai Target	Baik "B"
2019	83	84,01	101,22	Mencapai Target	Baik "B"
2018	80	83,5	104,38	Mencapai Target	Baik "B"

Sumber: Bidang Pemerintahan, 2022

Berdasarkan Tabel 2.10 nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kota Administrasi Jakarta Selatan cenderung mengalami peningkatan dan melebihi target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan aparatur Kota Administrasi Jakarta Selatan semakin baik.

II.3 Kinerja Pelayanan Kota Administrasi Jakarta Selatan Periode 2017-2022

II.3.1 Capaian Indikator Kinerja Kota Administrasi Jakarta Selatan Periode 2017-2022

Deskripsi capaian kinerja pelayanan Kota Administrasi Jakarta Selatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya pada periode 2017-2022 dapat di lihat pada Tabel 2.18 di bawah ini.

Tabel 2.18 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kota Administrasi Jakarta Selatan Periode 2017-2022

No	Indikator Program	Target Program					Realisasi Program					
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15
1	Jumlah Kantor dan Rumah Dinas Camat dan Lurah yang memenuhi standar	0	94	0	121/19	2	0	0	0	76/18	-	
2	Persentase Terlaksananya Tugas dan Fungsi Kota Administrasi Jakarta Selatan > 80 %	0	100	100	100	100	0	127	99,82	100	-	
3	Jumlah Kawasan yang Tertata	0	3	0	3	1	0	0	0	0	-	
4	Persentase Terbinanya Lembaga Kemasyarakatan	0	100	100	100	100	0	100	100	100	-	
5	Indeks kepuasan pelayanan kantor	4	4	4	4	4	4	3	4	4	-	
6	Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokolan	0	4	4	4	4	0	4	4	4	-	
7	Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	4	4	4	4	4	4	3	4	4	-	
8	Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia	0	83	84	84	84	0	83	100	TAD	-	
9	Persentase Penanganan Perkara Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan	0	100	100	100	100	0	100	100	100	-	
10	Persentase Penyelesaian Sengketa Hukum	0	100	100	100	100	0	100	100	100	-	
11	Persentase Capaian Kinerja Walikota (KPI, Perkin dan Lakip)	0	100	100	100	100	0	100	100	100	-	
12	Persentase terselesaikannya Permasalahan Terhadap Pelaksanaan Kota Sehat	0	0	100	100	100	0	0	100	100	-	
13	Persentase terselesaikannya Permasalahan Terhadap Pelaksanaan Kota Layak Anak	0	0	100	100	100	0	0	100	100	-	
14	Persentase terselesaikannya Permasalahan Terhadap Pelaksanaan BOP dan BOS	0	0	100	100	100	0	0	100	100	-	

RENCANA STRATEGIS KOTA ADMINISTRATIF JAKARTA SELATAN TAHUN 2023 – 2026

15	Persentase Jumlah Wirausaha Baru Yang Tercapai	0	100	100	100	100	0	100	100	100	-	
16	Persentase Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	0	80	82	83	85	0	80	100	94,83	-	
17	Persentase Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	0	80	82	83	85	0	80	100	96,93	-	
18	Indeks kepuasan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Daerah	0	0	4	4	4	0	0	4	4	-	
19	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan Kelurahan, Kecamatan dan Kota Administrasi Jakarta Selatan	0	3	4	4	4	0	3	4	4 (91,28)	-	
20	Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	0	4	4	4	0	0	4	4	-	
21	Indeks kepuasan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Daerah	0	0	4	4	4	0	0	4	4	-	
22	Koordinasi Pelaksanaan Kota Sehat	0	100	0	100	0	0	100	0	100	-	
23	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota	0	100	0	100	0	0	100	0	100	-	
24	Koordinasi pelaksanaan BOP dan BOS	0	100	0	100	0	0	100	0	100	-	
25	Koordinasi Pelaksanaan Kota Layak Anak	0	100	0	100	0	0	100	0	100	-	
26	Jumlah Kantor Lurah/Rumah Dinas dan Sarana Perlengkapannya yang memenuhi standar	0	105	0	121	0	0	105	0	76	-	
27	Jumlah Kantor Camat/Rumah Dinas dan Sarana Perlengkapannya yang memenuhi standar	0	16	0	19	0	0	16	0	18	-	

Sumber : Bagian Kepegawaian, Tatalaksana dan Pelayanan Publik Kota Administrasi Jakarta Selatan, 2022

Keterangan :  = Sesuai Target

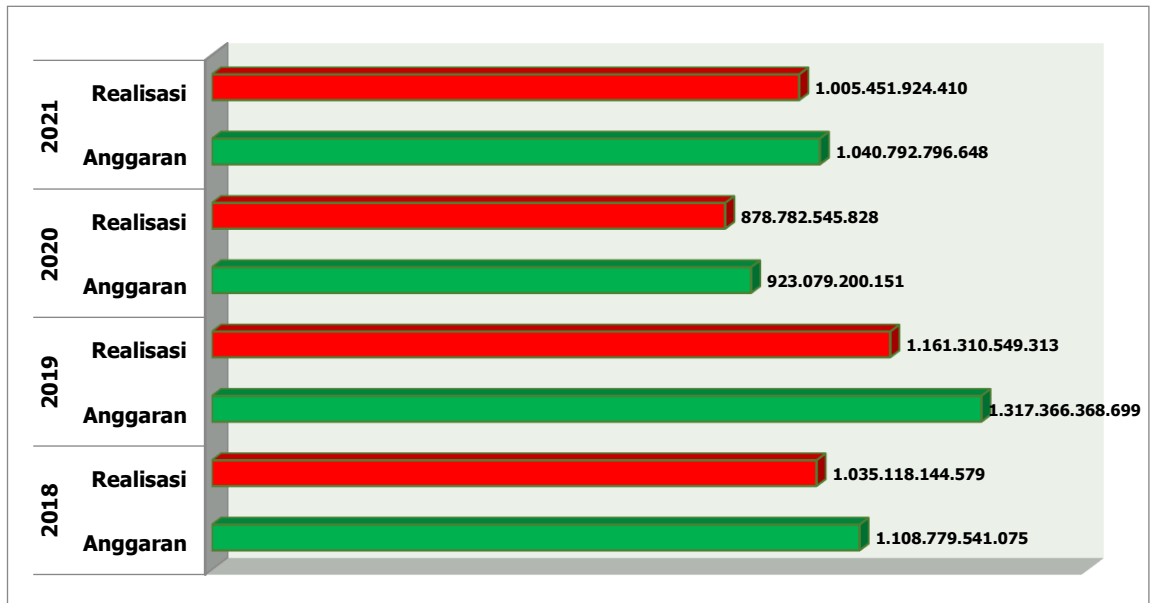
 = Belum memenuhi Target

Berdasarkan Tabel 2.18 di atas, dapat diketahui bahwa pada periode 2017-2022 indikator ukuran keberhasilan pelayanan Kota Administrasi yang bersumber dari dokumen Lakip belum seluruhnya menggambarkan pelayanan Kota Administrasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Beberapa indikator bersifat komposit menggambarkan keberhasilan pelayanan OPD teknis, sehingga tidak dapat mengukur keberhasilan Kota Administrasi. Dalam perspektif kedepan, perumusan indikator ukuran keberhasilan pelayanan Kota Administrasi akan terus ditingkatkan kualitasnya sehingga dapat menghasilkan ukuran pelayanan yang dapat mengukur pelayanan Kota Administrasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

II.3.2 Realisasi Anggaran Kota Administrasi Jakarta Selatan Periode 2017-2022

Deskripsi realisasi anggaran pelayanan Kota Administrasi Jakarta Selatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya pada periode 2017-2022 dapat di lihat pada Gambar 2.10 di bawah ini.

Anggaran yang diterima oleh Kota Administrasi Jakarta Utara tahun 2018-2021 mengalami jumlah yang fluktuatif. Anggaran yang diterima paling besar pada tahun 2019 sebesar Rp 1,317,366,368,699. Sedangkan anggaran yang diterima paling kecil pada tahun 2020 sebesar Rp 923,079,200,151. Hal ini karena imbas refocusing anggaran dalam rangka penanggulangan penyebaran pandemi Covid-19 di Kota Administrasi Jakarta Selatan.



Gambar 2.10 Anggaran dan Realisasi Tahun 2018-2021

Sumber : Bagian Keuangan 2022

Berdasarkan Gambar 2.10 menunjukkan bahwa realisasi tahun 2018 sebesar 93,36 persen; tahun 2019 sebesar 88,15 persen; tahun 2020 sebesar 95,20 persen; dan tahun 2021 sebesar 96,60 persen. Realisasi pada tahun 2020 dan 2021 meningkat kisaran 95 dan 96 persen. Oleh karena itu, realisasi anggaran tahun berikutnya diharapkan tetap tinggi agar target kinerja yang sudah ditetapkan bersama dapat tercapai sesuai keinginan yang diharapkan.

II.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kota Administrasi Jakarta Selatan

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan yang dihadapi Kota Administrasi Jakarta Selatan akan semakin kompleks. Berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh Kota Administrasi Jakarta Selatan menuntut adanya peningkatan peran, kewenangan dan kapasitas Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam menciptakan berbagai kebijakan dan pelayanan yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan pembangunan daerah.

Adapun beberapa hal yang menjadi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan bagi Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat di wilayah Jakarta Selatan, membina kecamatan dan kelurahan serta melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Gubernur, antara lain adalah:

II.4.1 Tantangan

II.4.1.1 Laju Urbanisasi

Jakarta masih menjadi tujuan urbanisasi bagi masyarakat di luar Jakarta untuk mencari peluang kehidupan yang lebih baik. Kondisi ini terjadi karena 70% perputaran ekonomi ada di Jakarta. Dalam konteks ini, Jakarta Selatan turut menjadi tujuan urbanisasi. Jika tidak ada intervensi pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengendalikan laju urbanisasi, maka dapat berpotensi menimbulkan peningkatan kawasan kumuh, menambah kemacetan dan menambah pengangguran dan kemiskinan. Pada akhirnya bermuara pada peningkatan tingkat kerawanan sosial (tingkat kesehatan rendah, kebodohan, tunawisma, pelacuran, kriminalitas) yang menghambat proses pembangunan wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Kepadatan penduduk di Kota Administrasi Jakarta Selatan tahun 2020 mencapai 16.768,64 jiwa/Km². Kepadatan penduduk di 10 kecamatancukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di

Kecamatan Tebet sebesar 26.574,80 Jiwa/Km² dan terendah di Kecamatan Kebayoran Baru sebesar 12.113,62 jiwa/Km². Kota Administrasi Jakarta Selatan termasuk dalam kategori sangat padat (≥ 400 jiwa/Km²), khususnya di kecamatan Tebet diperlukan pemerataan lingkungan pemukiman perkotaan, pemerataan dan persebaran penduduk ke wilayah kecamatan lain dan penggalakan program keluarga berencana (KB) agar lebih optimal.

II.4.1.2 Potensi Gangguan Keamanan

Wilayah Kota Administrasi di Ibu Kota Negara, Jakarta Selatan tidak terlepas dari tantangan adanya potensi gangguan keamanan. Gangguan keamanan dapat berasal dari gangguan kriminal dan gangguan keamanan yang bersifat politis. Salah satu kontribusi terhadap peningkatan gangguan kriminal adalah masih adanya ketimpangan sosial ekonomi yang tinggi di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Sejak tahun 2017 hingga sebelum pandemi, tingkat kemiskinan Kota Administrasi Jakarta Selatan berada pada tren menurun. Kenaikan tingkat kemiskinan mulai terjadi pada tahun 2020, hal ini disebabkan Pandemi Covid-19. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2019 sebesar 2,73 persen, meningkat menjadi 3,4 persen pada tahun 2020. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2021 naik kembali menjadi 3,56. Kenaikan tingkat kemiskinan menjadikan catatan khusus Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Data mengenai Garis Kemiskinan Kota Administrasi Jakarta Selatan pada tahun 2017 sebesar 620.712 rupiah/kapita/bulan; tahun 2018 sebesar 680.167 rupiah/kapita/bulan; tahun 2019 sebesar 729.256 rupiah/kapita/bulan; tahun 2020 sebesar 782,7 rupiah/kapita/bulan. Pandemi Covid-19 menjadikan sulitnya pemulihan daya beli penduduk, yang akan menyulitkan pula bagi penduduk miskin untuk melewati garis kemiskinan.

Gangguan yang bersifat politis dapat terjadi karena di wilayah Kota Jakarta Selatan terdapat banyak pusat-pusat kegiatan strategis dan aset-aset penting. Apalagi adanya Pemilu dan Pilkada serentak di tahun 2024. Selain itu, sebagian besar kediaman pejabat tinggi negara maupun kediaman perwakilan negara terdapat di Jakarta Selatan. Hal ini berpotensi menarik minat kelompok tertentu yang ditunggangi kepentingan politis untuk melakukan tindakan-tindakan yang mengancam keamanan.

II.4.1.3 Potensi Bencana

Bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis (Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana).

Bencana disebabkan oleh faktor alam, non alam, dan manusia. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mendefinisikan mengenai bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror. Bencana yang terjadi disebabkan oleh dua yaitu bencana alam dan bencana non alam.

Bencana alam berdasarkan peta bencana Indonesia, terdapat 315 kabupaten/kota yang berada di daerah bahaya banjir dengan jumlah penduduk 61 juta jiwa, dan DKI Jakarta termasuk didalamnya. Dalam konteks Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan persebaran daerahrawan banjir berdasarkan data tahun 2021 meliputi seluruh kecamatan yang ada. Warga yang terdampak dan mengungsi akibat banjir sebanyak 21.344 jiwa

Data BPBD Provinsi DKI Jakarta, terdapat sedikitnya 10 titik rawan longsor yang berada di Jakarta. Delapan wilayah diantaranya terdapat di Jakarta Selatan (Kecamatan Kebayoran Lama, Kebayoran Baru, Tebet, Pesanggrahan, Pasar Minggu dan Kecamatan Cilandak). Jumlah kejadian bencana alam tanah longsor di Kota Administrasi Jakarta Selatan pada tahun 2021 sejumlah 4 titik rawan longsor. Warga yang terdampak tanah longsor sebanyak 8 kelurahan.

Potensi bencana kejadian kebakaran di Jakarta Selatan menduduki peringkat pertama dibanding wilayah lain di Provinsi DKI Jakarta. Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 446 kasus kebakaran. Dari 446 kasus tersebut 30 kasus terjadi pada bulan Januari, 38 kasus di bulan Februari, 43 kasus di bulan Maret, 39 kasus di bulan April, 42 kasus di bulan Mei, 24 kasus di bulan Juni, 43 kasus di bulan Juli, 30 kasus di bulan Agustus, 39 kasus di bulan September, 39 kasus di bulan Oktober, 31 kasus di bulan November dan 48 kasus di bulan Desember.

Bencana non alam yang terjadi yakni penyakit virus corona (COVID-19), penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Sebagian besar orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang, dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Namun, sebagian orang akan mengalami sakit parah dan memerlukan bantuan medis.

Melansir data dari kemkes.go.id, covid19.go.id, BNPB, hingga Kamis (3/3/2022) jam 20:01:47, jumlah yang positif terinfeksi virus corona di Kota

Jakarta Selatan telah mencapai 243.062. Sedangkan yang meninggal akibat COVID-19 sebanyak 2.968 orang, dan 7.296 positif aktif (masih dirawat), serta 232.798 orang dinyatakan sembuh.

Dengan demikian, Kota Administrasi Jakarta Selatan perlu mengoptimalkan koordinasi dengan para pemangku kepentingan dan meningkatkan kesiapsiagaan agar sebaran titik banjir dan titik longsor dapat secara perlahan berkurang, serta potensi kebakaran dapat dihindari.

II.4.1.4 Kemacetan

Kemacetan lalu lintas masih menjadi masalah besar transportasi di Jakarta Selatan. Kemacetan membuat biaya transportasi dan biaya persediaan bahan baku meningkat serta dapat menurunkan produktivitas tenaga kerja. Pekerja yang harus menembus kemacetan menuju kantor sudah mengalami kelelahan ketika sampai sehingga tidak mampu bekerja secara optimal. Kondisi demikian dapat bermuara pada terhambatnya pertumbuhan ekonomi di wilayah Kota Jakarta Selatan. Salah satu penyebab utama kemacetan di Jakarta adalah pembangunan infrastruktur belum mampu mengimbangi jumlah kendaraan yang melintas serta masih belum optimalnya pembatasan penggunaan kendaraan. Idealnya 20 persen dari total luas lahan di suatu wilayah seharusnya digunakan untuk infrastruktur transportasi, seperti jalan. Namun, kondisi eksisting total luas jalan di Jakarta masih sangat minim yaitu hanya sekitar 6-7 persen dari total luas lahan.

II.4.1.5 Pelanggaran Pemanfaatan Ruang

Masih banyak pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan apa yang telah ditentukan di dalam Perda 1 Tahun 2014. Ketidaksiesuaian yang sering terjadi di lapangan bervariasi, diantaranya pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin yang disetujui dan pelaksanaan pembangunan gedung yang tidak sesuai dengan lampiran gambar pada izin yang disetujui.

Faktor utama yang menyebabkan timbulnya ketidaksesuaian pemanfaatan ruang tersebut diduga karena lemahnya pengawasan dan kurang tegasnya tindakan penertiban terhadap indikasi pelanggaran yang terjadi di lapangan dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait.

II.4.2 Peluang

II.4.2.1 Adanya Peraturan Perundangan yang Mendukung Pelayanan Kota Administrasi Jakarta Selatan

Adanya Undang-Undang No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi dasar pelayanan yang dilakukan oleh Kota Administrasi Jakarta Selatan. Lebih lanjut, Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 286 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta juga menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Keputusan Gubernur tersebut mengatur berbagai kewenangan yang dilimpahkan dan atau tetap berada di tingkat Provinsi. Dalam hal kewenangan yang dilimpahkan kepada Kota/Kabupaten adalah kewenangan pelayanan publik yang bersifat koordinasi pelaksanaan tugas perangkat di wilayah Jakarta Selatan, pembinaan kecamatan dan kelurahan serta melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Gubernur.

II.4.2.2 Pusat Kegiatan Ekonomi

Perkembangan perekonomian Jakarta Selatan menjadi salah satu pendorong perekonomian Provinsi DKI Jakarta. Hal tersebut dapat diketahui dari kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jakarta Selatan terhadap total PDRB DKI Jakarta yang berkisar 22,78 persen. Pada tahun 2021, besaran PDRB Jakarta Selatan atas dasar harga berlaku mencapai 668.661,66 miliar rupiah. PDRB atas dasar harga konstan 2021 mencapai 429.398,83 miliar rupiah. Ditambah lagi, di wilayah Jakarta Selatan juga

terdapat pusat pemerintahan dan pusat bisnis. Dengan demikian, aktivitas ekonomi yang terjadi sangat berkontribusi terhadap pengurangan pengangguran dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

Angkatan kerja pada tahun 2021 berjumlah sebesar 1.101.337 jiwa, dengan persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja sebesar 61,44 persen. Sedangkan jumlah bukan angkatan kerja sebesar 691.147 jiwa. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Administrasi Jakarta Selatan tahun 2020-2021 mengalami trend penurunan sebesar 1,22 persen. Hal ini menunjukkan kemampuan ekonomi Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (supply) tenaga kerja yang ada.

Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Administrasi Jakarta Selatan pada tahun 2018 sebesar 65,88%; tahun 2019 sebesar 63,75%; tahun 2020 sebesar 63,81%; dan pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi sebesar 61,44%. Hal ini memberikan informasi bahwa dari 100 orang penduduk usia kerja, hampir sebesar 61 orang diantaranya adalah angkatan kerja, sedangkan sekitar 39 persen adalah bukan angkatan kerja. Adanya peningkatan bukan angkatan kerja menjadikan Kota Administrasi Jakarta Selatan harus meningkatkan dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi warganya.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Administrasi Jakarta Selatan mengalami trend peningkatan tiap tahunnya. Pada tahun 2017 sebesar 84,13 persen; tahun 2018 sebesar 84,44 persen; tahun 2019 sebesar 84,75 persen; tahun 2020 sebesar 84,72 persen; dan pada tahun 2021 sebesar 84,90 persen. Capaian IPM ini termasuk dalam klasifikasi sangat tinggi (IPM \geq 80). Peningkatan IPM ini merupakan bukti kerja nyata Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam mensejahterakan masyarakatnya.

II.4.2.3 Tingkat Partisipasi Masyarakat

Dalam pengelolaan sampah di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan, masyarakat telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan pengelolaan organik melalui pengembangan BSF (Black Soldier Fly), pengelolaan sampah organik menjadi ecoenzyme, dan pengelolaan sampah anorganik melalui bank sampah.

Jumlah sampah organik yang berhasil terkelola di wilayah Kota Adm. Jakarta Selatan dari bulan Agustus 2021 hingga Februari 2022 adalah 148.233,11 kg, dengan rincian 147.260,55 kg sampah dari kegiatan pengembangan BSF dan 927,56 dari kegiatan ecoenzyme. Sedangkan, jumlah sampah anorganik yang berhasil terkelola di wilayah Kota Adm. Jakarta Selatan dari bulan Agustus 2021 hingga Februari 2022 adalah 1.242.792,63 kg sampah dengan jumlah nasabah sebanyak 43.361 nasabah. Adanya partisipasi masyarakat tersebut menjadi modal sosial dalam mewujudkan Jakarta yang Maju Kotanya, Bahagia Warganya.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Perumusan isu-isu strategis Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai perangkat daerah unsur pembantu Gubernur, dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi sesuai dengan pelayanan yang diberikan menurut peraturan perundang-undangan. Adapun program prioritas berupa optimalisasi pelayanan publik dan penataan kawasan. Dalam perumusan isu-isu tersebut akan dimulai dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Kota Administrasi Jakarta Selatan. Selanjutnya dilakukan telaahan terhadap visi, misi, dan RPJMD Provinsi DKI Jakarta periode 2023-2026 sebagai dasar pelaksanaan tugas Kota Administrasi Jakarta Selatan kedepan, yang selanjutnya akan menjadi dasar penetapan isu-isu strategis Kota Administrasi Jakarta Selatan periode 2023-2026. Adapun penjelasan tahapan perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

III.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kota Administrasi Jakarta Selatan

Sebagaimana Tabel 2.18 tentang pencapaian kinerja Kota Administrasi Jakarta Selatan periode 2017-2022 pada bab sebelumnya, bahwa kinerja Kota Administrasi Jakarta Selatan masih belum menunjukkan kinerja yang optimal. Hal ini bisa dilihat dari adanya pencapaian kinerja Kota Administrasi Jakarta Selatan yang belum mencapai target, sehingga terdapat gap atau permasalahan yang perlu diberikan solusi. Adapun penyebab dari permasalahan utama tersebut yang menjadi dasar perbaikan permasalahan pelayanan Kota Administrasi Jakarta Selatan adalah sebagai berikut :

III.1.1 Permasalahan Makro Pelayanan Wilayah Kota Administrasi

Dalam kerangka pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, kedudukan Kota Administrasi Jakarta Selatan berbeda dengan wilayah kota lainnya di Indonesia yang memiliki asas otonomi daerah tingkat kota/kabupaten sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun kedudukan Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam kerangka pemerintahan Provinsi DKI Jakarta merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang membantu Gubernur dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Camat dan Lurah serta mengoordinasikan, memantau dan mengawasi operasional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Hal tersebut berimplikasi pada terbatasnya kewenangan Walikota beserta perangkatnya yang hanya memiliki fungsi koordinasi, fasilitas dan administrasi. Akan tetapi, tidak memiliki fungsi teknis dalam menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan lintas urusan yang terus berkembang di wilayahnya. Namun demikian, Kota Administrasi Jakarta Selatan berfungsi sebagai lapisan terdepan dalam berinteraksi dengan persoalan-persoalan masyarakat, sehingga keterbatasan kewenangan tersebut menjadi akar masalah dalam konteks pelayanan kepada warga masyarakat di Jakarta Selatan.

Secara umum capaian kinerja Kota Administrasi Jakarta Selatan telah didominasi realisasi indikator yang mencapai target. Dari 22 indikator kinerja, sejumlah 17 (77,3%) telah menunjukkan realisasi yang mencapai target. Adapun lima indikator (22,7%) lainnya yang belum dapat mencapai target diantaranya indikator :

- 1) Koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi kota (bagian perekonomian) pada tahun 2019 ditargetkan 100 persen, namun realisasi tahun 2019 sebesar 48,48 persen.

- 2) Koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana Tata air Kota (SDA) pada tahun 2018-2019 ditargetkan 100 persen, namun realisasi pada tahun 2018 sebesar 62,52 persen dan tahun 2019 sebesar 57,58 persen.
- 3) Jumlah peserta Peningkatan Pengetahuan Hukum Aparat dan Masyarakat (bagian Hukum) pada tahun 2020-2021 ditargetkan 100 persen, namun realisasi pada tahun 2020 sebesar 60 persen dan tahun 2021 sebesar 10,91 persen.
- 4) Jumlah peserta penyuluhan Hukum Terpadu (Bagian Hukum) pada tahun 2021 ditargetkan 100 persen, namun realisasi pada tahun 2021 sebesar 36,36 persen.
- 5) Koordinasi penanggulangan kemiskinan kota/kabupaten (Bagian Kesra) pada tahun 2019 ditargetkan 100 persen, namun realisasi pada tahun 2019 sebesar 52,02 persen.

Penjabaran lebih lanjut disampaikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Makro Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Kurang responsif dalam menyelesaikan persoalan pelayanan masyarakat yang bersifat lintas urusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya delay time antara aduan masyarakat terhadap suatu persoalan dengan solusi yang diberikan; 2. Rantai koordinasi yang panjang dengan OPD teknis dan kurangnya kewenangan kota administrasi terhadap pelayanan teknis mengakibatkan adanya delay time penyelesaian persoalan yang bersifat teknis dan lintas urusan; 3. Disamping itu, wilayah kota administrasi berfungsi sebagai garda terdepan mendengar persoalan 	Terbatasnya Kewenangan pelayanan wilayah kota administrasi

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		masyarakat, namun hanya men-delivery persoalan tersebut ke OPD terkait untuk ditindaklanjuti.	

Sumber : Hasil FGD

III.1.2 Permasalahan Pelayanan di Bagian-Bagian Kantor Administrasi Jakarta Selatan

Konsep perencanaan strategis yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 diketahui bahwa penyusunan perencanaan mutlak bertumpu pada identifikasi masalah, sehingga solusi- solusi yang dibuat dalam bentuk kegiatan-kegiatan harus ditujukan untuk penyelesaian permasalahan, bukan hanya sekedar untuk memenuhi keinginan. Pemendagri No. 86 Tahun 2017 juga menjelaskan bahwa identifikasi masalah berpedoman pada indikator kinerja outcomes periode lalu yang pencapaiannya masih belum optimal.

Indikator Kota Administrasi Jakarta Selatan periode lalu tidak sepenuhnya bersifat outcomes (pada Tabel 2.14) melainkan didominasi indikator yang bersifat output. Hal ini berkaitan dengan tugas dan fungsi Kota Administrasi Jakarta Selatan yang mengampu fungsi administrasi, koordinasi dan fasilitasi sehingga pengukuran kinerja tidak sepenuhnya dapat menggunakan indikator outcomes. Indikator-indikator tidak dilengkapi data series selama 5 tahun.

Selain itu, terdapat beberapa penggunaan indikator yang berbeda beda tiap tahunnya serta terdapat indikator yang bersifat komposit (terdapat kontribusi dari perangkat daerah lain). Oleh karena itu pada bagian ini identifikasi permasalahan tidak berpedoman pada indikator outcomes, melainkan disusun berdasarkan permasalahan-permasalahan bidang-bidang yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Identifikasi permasalahan ini menjadi landasan penyusunan solusi (program kegiatan)

Renstra Kota Administrasi Jakarta Selatan pada Bab VI. Secara rinci identifikasi permasalahan dijabarkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2 Identifikasi Permasalahan Bagian – Bagian Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

No	Bagian	Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
1	Bagian Tata Pemerintahan	1. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas bangunan kantor kecamatan, kelurahan dan rumah dinas.	1. Melakukan pembangunan dan rehab fasilitas kantor camat, lurah, dan rumah dinas serta fasilitas pendukung lainnya.
		2. Masih lemahnya kapasitas lembaga kemasyarakatan.	2. Meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan RT, RW dan LMK, FKMD.
		3. Masih perlunya peningkatan kualitas penanggulangan bencana dan penertiban umum.	3. Mengoptimalkan koordinasi penanggulangan bencana dan koordinasi penertiban umum.
		4. Masih perlunya peningkatan kualitas pelayanan kecamatan dan kelurahan.	4. Mengoptimalkan pembinaan dan evaluasi terhadap kecamatan dan kelurahan.
2	Bagian Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya pelayanan di bidang hukum; 2. Belum optimalnya kesadaran masyarakat terhadap hukum dan hak asasi manusia 3. Belum optimalnya dukungan aparat di lingkungan kota adm Jakarta Selatan; 4. Belum optimalnya pengelolaan data dan informasi hukum dalam pengurusan perkara maupun penyelesaian sengketa pertanahan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan pelayanan pengurusan perkara di tingkat Kota; 2. Mengoptimalkan pelayanan sengketa pertanahan di tingkat kota; 3. Mengoptimalkan usaha peningkatan kesadaran hukum dan hak asasi manusia; 4. Mengoptimalkan pengelolaan data dan informasi serta meningkatkan kemudahan penyampaian data dan informasi kepada stakeholder yang membutuhkan.
3	Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	1. Belum optimalnya pelayanan publik;	1. Meningkatkan peran kelembagaan RT, RW dan LMK, FKMD
		2. Belum optimalnya disiplin aparat;	2. Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi kinerja pegawai dan kinerja organisasi;
		3. Masih belum adanya SOP pelaksanaan kegiatan di sekretariat kota, kelurahan dan kecamatan.	3. Penyusunan, Pembinaan serta Pendampingan SOP di Kantor sekretariat kota, Kecamatan dan Kelurahan.
4	Bagian Perekonomian	1. Masih perlu dioptimalkan koordinasi dan monev terhadap SKPD/UKPD yang menjadi mitra Bidang Perekonomian.	1. Mengoptimalkan koordinasi, pengendalian dan evaluasi pembentukan Kewirausahaan Baru pada Kota Administrasi Jakarta Selatan.
			2. Mengoptimalkan koordinasi, pengendalian dan evaluasi bidang kepariwisataan dan ketenagakerjaan

No	Bagian	Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
			tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan.
			3. Mengoptimalkan koordinasi, pengendalian dan evaluasi bidang usaha kecil dan menengah, perdagangan serta ketahanan pangan Kota Administrasi Jakarta Selatan.
			4. Mengoptimalkan koordinasi, pengendalian dan evaluasi bidang perhubungan, perindustrian dan energi Kota Administrasi Jakarta Selatan.
			5. Mengoptimalkan Pengendalian dan Evaluasi Penataan Kawasan di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
5	Bagian Penataan Kota dan Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya penataan kota dan lingkungan hidup. 2. Tidak ada sanksi hukum tegas pada pelaku pelanggaran lingkungan. 3. Belum optimalnya penanggulangan bencana banjir yang setiap tahun berulang. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan tugas dan fungsi pelayanan lingkungan hidup dan kebersihan. 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan dan penanganan kebersihan kota. 3. Mengoptimalkan sanksi hukum pelaku pelanggaran lingkungan. 4. Mengoptimalkan penanggulangan bencana banjir (misalnya normalisasi sungai).
6	Bagian Umum dan Protokol	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih perlu ditingkatkannya capaian indeks kepuasan pelayanan keprotokolan. 2. Masih perlu dioptimalkannya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. 3. Masih perlu dioptimalkannya pengelolaan Aset Walikota. 4. Masih perlu dioptimalkannya Pemeliharaan Gedung kantor Walikota, Rumah Dinas Walikota dan fasilitas pendukungnya karena kurangnya SDM pegawai yang memiliki kemampuan teknis. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan penyelenggaraan kegiatan keprotokolan dan penyelenggaraan jamuan resmi di Kota Administrasi Jakarta Selatan. 2. Penyediaan dan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sesuai kebutuhan berdasarkan RKBU dan RKPBU. 3. Mengoptimalkan pengelolaan aset di kecamatan dan kelurahan Kota 4. Meningkatkan Pemeliharaan Gedung kantor Walikota, Rumah Dinas Walikota dan fasilitas pendukungnya, berkoordinasi dengan Dinas/Sudin teknis.
7	Bagian Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih perlu dioptimalkan pengelolaan aset 2. Belum optimalnya kualitas pelayanan keuangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan pengelolaan aset di kecamatan dan kelurahan Kota. 1. Pembinaan pengelolaan administrasi keuangan terhadap PA/KPA, PPK OPD dan PPTK OPD; 2. Pembinaan pengelolaan administrasi keuangan bagi bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu;

No	Bagian	Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
			<ol style="list-style-type: none"> 3. Peningkatan Penanganan tindak lanjut pemeriksaan administrasi keuangan; 4. Meningkatkan kualitas penyusunan laporan keuangan.
8	Bagian Kesejahteraan Rakyat	1. Belum optimalnya dalam menanggulangi wabah pandemi Covid-19;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penambahan sarana dan prasarana RSUD terutama kamar rawat inap bagi penyakit menular. 2. Penambahan puskesmas pembantu 3. Penambahan tenaga medis 4. Penambahan tabung oksigen 5. Penambahan ambulance
		2. Belum optimalnya pelayanan terkait penanggulangan kemiskinan, Pelaksanaan Kota sehat, kota layak anak, Pelaksanaan BOP dan BOS, pelaksanaan posyandu, kesehatan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan Kemiskinan, Kota Sehat, Kota Layak Anak, Pelaksanaan BOP dan BOS.
		3. Belum optimalnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; kesetaraan gender, dan masih perlu ditingkatkannya kualitas pelayanan kegiatan keagamaan tingkat kota.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan Pembinaan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 2. Mengoptimalkan kesetaraan gender di semua bidang 3. Mengoptimalkan koordinasi bidang kesehatan; 4. Mengoptimalkan pelaksanaan PSN; 5. Mengoptimalkan pelayanan Keagamaan (MTQ).
		4. Belum optimalnya pelayanan air bersih dan sanitasi sehat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan jaringan air bersih dan sanitasi sehat.
9	Kecamatan	Masih perlu optimalisasi teknis pelaksanaan musrenbang, optimalisasi kualitas FKDM, kegiatan olahraga masyarakat, keamanan dan ketertiban.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan pelaksanaan musrenbang kecamatan; 2. Mengoptimalkan kinerja FKDM; 3. Mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan olahraga tingkat Kota; 4. Mengoptimalkan pelayanan keamanan dan ketertiban.
10	Kelurahan	Masih perlu ditingkatkan kualitas pelayanan keamanan dan ketertiban, peningkatan peran RT,RW,LMK, peningkatan kewaspadaan dini masyarakat tingkat kelurahan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam kebersihan lingkungan, pelayanan kesehatan (posyandu, DBD), perlindungan hukum dan peningkatan kinerja PPSU.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan peningkatan peran kelembagaan RT,RW, LMK; 2. Mengoptimalkan pembinaan kewaspadaan dini masyarakat; 3. Mengoptimalkan koordinasi dan pembinaan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kebersihan lingkungan; 4. Mengoptimalkan koordinasi pelayanan kesehatan; perlindungan hukum Mengoptimalkan penanganan prasarana sarana umum.

Sumber : Hasil FGD

III.2 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Nomor 66 perihal Penguatan Peran Walikota/Bupati dalam Penataan Kawasan berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1263 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Nomor 1042 Tahun 2018 Tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah.

1. Kawasan Tebet

a. *Progress* kegiatan Penataan Kawasan Tebet adalah sebagai berikut:

1) Untuk renaksi Pembangunan Trotoar dan Bangunan Pelengkap Jalan di Jl. Tebet Timur Raya dan Jl. Tebet Raya (Lanjutan) yang berada di bawah tanggung jawab Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta, diketahui bahwa Sudin Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Selatan telah melakukan pembangunan trotoar dengan *progress* pekerjaan:

- a) Jalan Tebet Utara Dalam, sebesar 3,09%.
- b) Jalan Tebet Raya Lanjutan, sebesar 0,24%.
- c) Jalan Tebet Timur Raya, sebesar 1,06%.

Kegiatan tersebut ditargetkan selesai pada akhir bulan Juli 2022.

2. Kawasan Bintaro

a. *Progress* kegiatan Penataan Kawasan Bintaro adalah sebagai berikut:

- 1) Perencanaan dan DED Trotoar (Area Stasiun Pondok Betung Barat) telah dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta.
- 2) Pembangunan Urban Farming di Sekitar Danau Cavalio dan Danau Bintaro.
- 3) Pembangunan Saluran Air di Sekitar Danau Cavalio.

3. Kawasan Srengseng Sawah

- a. Kegiatan Penataan Kawasan Srengseng Sawah yang direncanakan akan diprioritaskan untuk dilakukan adalah pembangunan kolam retensi sebagai pengendali banjir, yang mana kegiatan tersebut akan dilakukan oleh Sudin SDA Kota Administrasi Jakarta Selatan. Namun demikian, berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan pada tanggal 07 Juni 2022, diketahui bahwa kondisi keuangan dari masing-masing SKPD/UKPD belum stabil untuk dilakukan penganggaran kegiatan. Mengingat kebutuhan anggaran yang besar untuk kegiatan pembebasan lahan dan kepadatan penduduk di sekitar kawasan tersebut, maka kegiatan Penataan Kawasan Srengseng Sawah dijadwalkan mundur pada tahun selanjutnya dan direncanakan sebagai kegiatan jangka panjang.

Sebagai tindak lanjut, terdapat beberapa hal yang akan dilaksanakan dalam rangka mempercepat proses implementasi penataan kawasan maupun mengatasi beberapa kendala yang dihadapi, diantaranya:

1. Memberikan usulan agar dapat melaksanakan Rapat Koordinasi tingkat Provinsi untuk membahas rencana aksi:
 - a. Reaktivasi Stasiun Pondok Betung, mengingat kegiatan tersebut akan melibatkan instansi pemerintah pusat (Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan RI).
 - b. Klarifikasi terhadap penyediaan anggaran dan pihak penanggung jawab pembangunan FPSA Tebet.
2. Melakukan peninjauan lapangan ke Kawasan Srengseng Sawah yang direncanakan akan diprioritaskan

III.3 Penentuan Isu-isu Strategis

III.3.1 Isu Global

III.3.1.1 Pengentasan Kemiskinan dan SDGs

Pada tahun 2022 juga merupakan kesempatan untuk memperdalam basis dukungan bagi prinsip-prinsip dasar dan pendekatan SDGs untuk manusia dan planet, dan berlaku untuk negara-negara berpenghasilan tinggi dan rendah. Ini juga akan memberikan kesempatan untuk menghubungkan solusi dan alat lokal dengan agenda global ini dan untuk mendorong fokus yang lebih besar dalam memastikan bahwa kita pulih dengan lebih baik dan lebih berkelanjutan untuk semua. "2022 juga menandai titik tengah menuju tenggat waktu 2030 untuk mencapai SDGs. Itu berarti jalan ke depan membutuhkan pemanfaatan dan bekerja dengan yang terbaik dari apa yang ditawarkan oleh berbagai aktor, dari pemerintah daerah hingga CEO, universitas, dan yayasan masyarakat." Kaysie Brown (Wakil Presiden untuk Inisiatif Kebijakan dan Strategis, Yayasan PBB).

III.3.2 Isu Nasional

III.3.2.1 Pemulihan Ekonomi Nasional

Pemulihan ekonomi nasional yang cepat merupakan salah satu usaha yang dilakukan untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19 dari segi perekonomian Indonesia. Dari sisi pemulihan ekonomi, ekonomi global diproyeksikan masih melanjutkan pemulihan, meski dihadapkan pada berbagai tantangan yang memicu sejumlah negara maju melakukan normalisasi kebijakan moneter.

Dengan berbagai kondisi perbaikan yang terjadi, prospek perekonomian Indonesia pada tahun 2022 diprediksi akan membaik oleh para analis dan lembaga multilateral, namun hal itu sangat tergantung dari Kebijakan PPKM

dan penanganan varian Omicron. Diprediksi pada tahun 2022 ini, perekonomian Indonesia akan dapat tumbuh sebesar 5,2%. Guna meneruskan pemulihan ekonomi, Pemerintah telah mengalokasikan Rp 455,62 Triliun anggaran PC-PEN tahun 2022, yang terdiri dari kluster Penanganan Kesehatan, Perlindungan Masyarakat, dan Penguatan Pemulihan Ekonomi. Program PEN 2022 diarahkan mendukung pemulihan dan Penyerapan Tenaga Kerja. Selain itu, program PEN sebagai respon atas penurunan aktivitas masyarakat yang berdampak pada ekonomi, khususnya sektor informal dan UMKM.

III.3.2.2 Percepatan Pembangunan Infrastruktur

Percepatan pembangunan infrastruktur diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan merata dan pertumbuhan ekonomi. Terdapat tiga fokus utama dalam pembangunan infrastruktur tahun 2022. Pertama, pembangunan infrastruktur yang dilakukan harus lebih berkualitas, smart dan ramah lingkungan. Pembangunan infrastruktur juga harus dapat membuka akses dan meningkatkan keterhubungan antar wilayah, antar daerah dan meningkatkan efisiensi serta produktivitas. Kedua, pada kegiatan-kegiatan prioritas untuk infrastruktur yang sudah terbangun, meliputi Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi, dan Rehabilitasi (OPOR). Ketiga, memprioritaskan dukungan terhadap 118 kawasan yang dikembangkan pada TA 2023.

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pilihan strategis dalam rangka mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nasional. Beberapa topik yang memerlukan percepatan seperti pembangunan infrastruktur penggerak ekonomi, pemerataan pelayanan dasar, dan pembangunan infrastruktur untuk menopang perkembangan berbagai kota dalam mengantisipasi peningkatan urbanisasi.

III.3.2.3 Peningkatan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

Visi misi Presiden yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 khususnya pada prioritas nasional ketiga, yaitu pembangunan SDM berkualitas dan berdaya saing. Beberapa aktivitas peningkatan kapabilitas SDM dengan menggandeng berbagai stakeholder mulai dari pemerintah pusat seperti Kemenaker, Kemendikbud-Ristek, BNSP, BPJS TK, pemerintah daerah, dunia usaha, Perguruan Tinggi, sampai organisasi internasional seperti International Labour Organization (ILO).

Komposisi penduduk Indonesia ditandai dengan tingginya proporsi penduduk usia produktif. Perubahan struktur penduduk ini akan membuka peluang bagi Indonesia untuk mendapatkan Bonus Demografi (Demographic Dividend) dalam jangka menengah dan panjang akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Bonus demografi ini akan diperoleh dengan prasyarat utama yakni tersedianya SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Beberapa usaha yang dilakukan dengan peningkatan kompetensi melalui program Pendidikan, Pelatihan, dan Sertifikasi Tenaga Kerja di Indonesia.

III.3.2.4 Transformasi Pelayanan Publik

Salah satu agenda utama pemerintah pada saat ini untuk mengefektifkan fungsinya, melalui upaya peningkatan fungsi birokrasi. Hal ini tidak terlepas dari realitas dan disadari oleh pemerintah dan berbagai pihak, bahwa disisi birokrasi dianggap sebagai organ pemerintah yang lamban, kurang efisien bahkan cenderung menghambat. Namun disisi lain secara faktual birokrasi dibutuhkan agar ada keteraturan proses dan dapat memberikan legitimasi bagi berbagai pihak untuk mendapatkan kan sesuatu yang dianggap berharga dan penting.

Birokrasi pemerintah sebagai organisasi pelayanan publik bergerak cepat mewujudkan pemerintahan yang digital. Konsep tradisional dalam melayani

publik sudah lama ditinggalkan. Semua pelayanan harus semakin memudahkan publik, bukan sebaliknya. Kondisi pandemi semakin menuntut hal tersebut. Salah satu langkah yang diprioritaskan adalah dengan cara transformasi organisasi. Sudah bukan hal baru, publik disuguhkan kemudahan untuk mengakses berbagai layanan pemerintahan. Tidak perlu dengan datang ke kantor pemerintah. Layanan hadir melalui website/aplikasi yang disesuaikan dengan mindset dan gaya hidup masyarakat, yang sudah lama enggan menemui proses birokrasi yang berbelit-belit.

Digitalisasi pelayanan sepatutnya mengusung konsep customer first. Publik sebagai pengguna pelayanan dapat menggunakan layanan sampai memberikan kritik dan saran pembangunan secara online. Bahkan jika pelayanan belum berbentuk digitalisasi, masyarakat dengan mudah dapat mengunjungi satu tempat untuk mengaksesnya. Seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Kita mengenal tempat tersebut dengan nama Mal Pelayanan Publik, satu tempat untuk berbagai macam keperluan pengurusan administrasi atau perizinan.

Dengan semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan birokrasi, maka yang penting untuk menjadi pokok perhatian adalah bagaimana cara untuk melakukan transformasi birokrasi agar fungsi dan tugas pokok sebagai public servant diwujudkan. Lingkungan dan isu transformasi pelayanan publik mencakup profesionalitas ASN, pelayanan publik, kelembagaan, dan akuntabilitas.

III.3.2.5 Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan

Pertahanan Negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman dan gangguan baik yang berasal dari luar maupun dari dalam negeri. Untuk mencapai tujuan tersebut, ada 4 (empat) sasaran strategis yang saling terkait, yaitu terselenggaranya pertahanan yang mampu menghadapi ancaman militer, terselenggaranya pertahanan yang mampu menghadapi ancaman nonmiliter, terselenggaranya pertahanan yang mampu untuk ikut serta mewujudkan perdamaian dunia dan stabilitas regional, serta terselenggaranya pertahanan negara yang didukung oleh industri pertahanan yang kuat dan mandiri.

Pembangunan politik, hukum, pertahanan dan keamanan (Polhukhankam) diarahkan untuk mewujudkan konsolidasi demokrasi, supremasi hukum dan HAM, birokrasi yang bersih dan terpercaya, rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat, serta keutuhan wilayah NKRI dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman baik dari dalam maupun luar negeri.

III.3.2.6 Kemiskinan di daerah Perkotaan

Kemiskinan merupakan permasalahan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang paling pokok seperti kesehatan, pendidikan dan air bersih. Permasalahan kemiskinan di Indonesia bagian dari fenomena sosial yang menghambat seorang individu untuk menjadi produktif. Perlu adanya kesadaran akan partisipasi masyarakat sekitar dengan mendukung program-program pemerintah dalam mengurangi kemiskinan dan pembangunan sumber daya manusia.

III.3.2.7 Ketahanan Pangan dan Energi

Sektor pertanian menjadi sorotan karena erat kaitannya dengan ketahanan pangan nasional. Apalagi di era pandemi yang sulit seperti sekarang, ketahanan pangan menjadi sesuatu yang harus diupayakan agar terhindar

dari krisis pangan di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan pemanfaatan sumber daya pangan lokal guna memperkaya keragaman pangan yang ada. Penggunaan produk impor dikhawatirkan akan mematikan pertanian dalam negeri. Muncul beberapa persoalan diantaranya ketergantungan terhadap pupuk anorganik tinggi dan masih sedikitnya petani yang bertransformasi menjadi pengusaha pertanian. Maka perlu diperhatikan bahwa fungsi pertanian lokal Indonesia dibagi menjadi dua yaitu ketahanan pangan dan ketahanan energi.

Ketahanan energi merupakan perpaduan antara ketahanan nasional dan ketersediaannya sumber daya alam untuk konsumsi energi. Permasalahan yang ada adalah kendala yang dialami Indonesia untuk memadai kebutuhan energi dan ancaman krisis energi pada tahun 2020-2030. Oleh karena itu, edukasi mengenai penggunaan energi yang lebih cermat dan mengganti penggunaan energi konvensional ke sumber daya energi yang dapat diperbaharui.

III.3.3 Isu Regional (Provinsi DKI Jakarta)

III.3.3.1 Ketahanan terhadap Bencana Alam dan Non Alam

Provinsi DKI Jakarta merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata +7 meter di atas permukaan laut, sehingga bencana alam banjir dan rob sering terjadi. Isu Jakarta tenggelam menjadi alarm bagi pemerintah, salah satu penyebabnya adalah penggunaan air tanah secara terus menerus oleh masyarakat. Mengingat urgensi permasalahan tersebut, perlu ada upaya yang terintegrasi dengan penanganan yang cepat.

Bencana non alam seperti kebakaran dan pandemi Covid-19. Kejadian kebakaran di DKI Jakarta pada tahun 2018 sebanyak 820 kejadian. Pada tahun 2020 meningkat menjadi 3156 kejadian, meningkat sebesar 26 persen. Kejadian kebakaran sebagian besar karena arus pendek listrik yang berada dipemukiman dan pasar. Pandemi Covid-19 merupakan salah satu

bencana non alam, DKI Jakarta merupakan wilayah yang paling banyak terdampak. Hal ini karena mobilitas masyarakat baik dalam dan luar negeri yang masif, sehingga penyebaran virus corona cepat menjangkit masyarakat DKI Jakarta.

III.3.3.2 Pembangunan Manusia

Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2021 memiliki indeks Pembangunan Manusia (IPM) termasuk dalam kategori sangat tinggi karena mencapai 81,11 atau tumbuh 0,42 persen dibanding tahun 2020 sebesar 80,77. Angka IPM DKI Jakarta diatas angka IPM Indonesia sebesar 72,29. Meskipun demikian, kualitas pendidikan dan kesehatan provinsi DKI Jakarta tetap harus ditingkatkan pada beberapa aspek seperti peningkatan literasi dan kualitas PAUD pada pendidikan. Pada bidang kesehatan dengan pengendalian penyakit menular dan masalah gizi.

III.3.3.3 Ekonomi Inklusif

Provinsi DKI Jakarta selama pandemi Covid-19 mengalami pertumbuhan ekonomi yang melambat, bahkan mengalami kontraksi. Namun sejak Triwulan II-2021, pertumbuhan ekonomi Provinsi DKI Jakarta kembali positif. Perekonomian DKI Jakarta terus membaik dan tumbuh lebih tinggi. Pada triwulan IV 2021, pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta tercatat sebesar 3,64%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya (2,43%). Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh peningkatan mobilitas masyarakat seiring dengan pelonggaran status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hingga ke level 1, serta momen Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru (Nataru). Pada periode pelonggaran tersebut, berbagai sektor ekonomi telah dibuka kembali dengan tingkat maksimum kapasitas yang lebih longgar, namun dengan penerapan prokes yang tetap ketat, yaitu menggunakan aplikasi PeduliLindungi. Pertumbuhan ekonomi Provinsi DKI Jakarta yang meningkat positif merupakan modal bagi pemulihan ekonomi.

III.3.3.4 Kota Berkelanjutan

Provinsi DKI Jakarta merupakan percontohan kota berkelanjutan, yakni kota yang memungkinkan semua warganya memenuhi kebutuhannya dan meningkatkan kesejahteraannya, tanpa menurunkan kondisi lingkungan alam atau kehidupan orang lain, di masa kini dan di masa depan. Batasan ini memang terlalu menyederhanakan seolah kota bisa hidup secara mandiri tanpa keterkaitan dengan wilayah lain di sekitarnya. Keberlanjutan suatu kota dengan demikian harus memperhatikan keberlanjutan wilayah-wilayah sekitar yang menjadi penopangnya.

Keberlanjutan DKI Jakarta sangat tergantung juga kepada keberlanjutan daerah-daerah sekitar yang menjadi sumber aliran sumberdaya kehidupan baik air, pangan, maupun pengelolaan limbah. Selain itu, pembangunan berkelanjutan Provinsi DKI Jakarta tidak hanya memperhatikan daya dukung lingkungan, tetapi juga daya dukung sosial. Daya dukung sosial memerlukan komitmen Pemerintah dan seluruh pihak untuk memastikan keseimbangan antara proses pembangunan ramah lingkungan (environmentally friendly) dengan menghormati ruang hidup sosial masyarakat yang terlebih dahulu ada.

III.3.3.5 Pemerintahan Dinamis dan Transformasi Pelayanan Publik

DKI Jakarta menjadi kota yang layak di jadikan barometer perilaku birokrasi di Indonesia karena dalam proses pelaksanaan reformasi birokrasi di DKI Jakarta selalu mengalami peningkatan yang pesat ditandai dengan penekanan angka kemiskinan, pertumbuhan ekonomi yang naik terus dan dapat menanggulangi pandemi Covid-19. Selain itu, DKI Jakarta sepanjang tahun 2020 telah mendapatkan penghargaan setidaknya 26 kali berturut-turut, artinya dapat dipastikan pelaksanaan reformasi birokrasi berjalan sesuai dengan harapan dan tujuan.

Birokrasi Provinsi DKI Jakarta harus menjadi wahana pengembangan diri para aparatur negara, agar semakin produktif, professional, melayani dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Aparatur negara harus mampu bekerja efektif dan berintegritas, mampu mewujudkan tata pemerintahan yang kolaboratif, inklusif dan transparan. Masyarakat DKI Jakarta tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi dilibatkan dalam proses penyusunan, implementasi dan evaluasi kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

III.3.3.6 Pemerataan Pembangunan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus menjamin redistribusi kesejahteraan sosial untuk pemerataan pembangunan. Ibu Kota akan merasakan peningkatan nilai ekonomi dan investasi dengan adanya pembangunan di berbagai wilayah. Pemprov DKI Jakarta untuk mulai memastikan pemerataan pembangunan. Salah satu caranya adalah memastikan pembangunan di lapangan sesuai dengan aturan hukum. Pembangunan yang dimaksudkannya seperti kawasan Transit Oriented Deveopment (TOD), pembangunan MRT-LRT, Pantai Kita Maju Bersama, kawasan Panai Ancol-Dunia Fantasi, dan lainnya. Pemprov DKI harus memberikan kepastian hukum dan pemenuhan kewajiban pembangunan sarana serta prasarana penunjang, seperti fasilitas sosial dan umum.

Kepastian hukum dapat membawa dampak positif dari pembangunan kota kepada masyarakat. Pemprov DKI Jakarta perlu bersinergi dengan dunia usaha, khususnya sektor yang paling merasakan penambahan nilai ekonomi yang dapat memperpendek jurang kesenjangan sosial. Pemprov DKI dapat mendorong pembangunan yang bermanfaat untuk masyarakat, seperti pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan taman bermain, penyediaan rumah susun, penataan kawasan, pembangunan transportasi umum, peningkatan dan pembangunan jalan, serta pembangunan infrastruktur banjir.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus mengurangi ketimpangan antara wilayah, seperti besaran tingkat kemiskinan. Tingkat kemiskinan wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu mencapai 14,87 persen dan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara mencapai 6,78 persen pada tahun 2020, jauh dibawah tingkat kemiskinan Provinsi yang mencapai 4,69 persen. Sedangkan wilayah di bawah rata-rata Provinsi yakni Jakarta Pusat sebesar 4,51 persen; Jakarta Timur sebesar 4,16 persen; Jakarta Selatan sebesar 4,34 persen; dan Jakarta Barat sebesar 4,25 persen.

Paramater lainnya adalah ketimpangan nilai IPM antar wilayah, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebesar 72,10, IPM Provinsi sebesar 81,11. Sedangkan wilayah lainnya sudah mencapai di atas 80. Oleh karena itu, ketimpangan garis kemiskinan dan IPM perlu diperhatikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

III.3.4 Isu Lokal (Kota Administrasi Jakarta Selatan)

III.3.4.1 Rawan Kebakaran dan Banjir

Potensi bencana kejadian kebakaran di Jakarta Selatan menduduki peringkat pertama dibanding wilayah lain di Provinsi DKI Jakarta. Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 446 kasus kebakaran. Dari 446 kasus tersebut 30 kasus terjadi pada bulan Januari, 38 kasus di bulan Februari, 43 kasus di bulan Maret, 39 kasus di bulan April, 42 kasus di bulan Mei, 24 kasus di bulan Juni, 43 kasus di bulan Juli, 30 kasus di bulan Agustus, 39 kasus di bulan September, 39 kasus di bulan Oktober, 31 kasus di bulan November dan 48 kasus di bulan Desember.

Bencana alam berdasarkan peta bencana Indonesia, terdapat 315 kabupaten/kota yang berada di daerah bahaya banjir dengan jumlah penduduk 61 juta jiwa, dan DKI Jakarta termasuk didalamnya. Dalam konteks Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan persebaran daerahrawan banjir berdasarkan data tahun 2021 meliputi seluruh kecamatan

yang ada. Warga yang terdampak dan mengungsi akibat banjir sebanyak 21.344 jiwa.

III.3.4.2 Laju Urbanisasi

Jakarta masih menjadi tujuan urbanisasi bagi masyarakat di luar Jakarta untuk mencari peluang kehidupan yang lebih baik. Kondisi ini terjadi karena 70% perputaran ekonomi ada di Jakarta. Dalam konteks ini, Jakarta Selatan turut menjadi tujuan urbanisasi. Jika tidak ada intervensi pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengendalikan laju urbanisasi, maka dapat berpotensi menimbulkan peningkatan kawasan kumuh, menambah kemacetan dan menambah pengangguran dan kemiskinan. Pada akhirnya bermuara pada peningkatan tingkat kerawanan sosial (tingkat kesehatan rendah, kebodohan, tunawisma, pelacuran, kriminalitas) yang menghambat proses pembangunan wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Kepadatan penduduk di Kota Administrasi Jakarta Selatan tahun 2020 mencapai 16.768,64 jiwa/Km². Kepadatan penduduk di 10 kecamatancukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Tebet sebesar 26.574,80 Jiwa/Km². Kota Administrasi Jakarta Selatan termasuk dalam kategori sangat padat (≥ 400 jiwa/Km²), khususnya di kecamatan Tebet diperlukan peremajaan lingkunganpemukiman perkotaan, pemerataan dan persebaran penduduk ke wilayah kecamatan lain dan penggalakan program keluarga berencana (KB) agar lebih optimal.

III.3.4.3 Kemiskinan di daerah Perkotaan

Sejak tahun 2017 hingga sebelum pandemi, tingkat kemiskinan Kota Administrasi Jakarta Selatan berada pada tren menurun. Kenaikan tingkat kemiskinan mulai terjadi pada tahun 2020, hal ini disebabkan Pandemi Covid-19. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2019 sebesar 2,73 persen, meningkat menjadi 3,4 persen pada tahun 2020. Jumlah penduduk miskin

pada tahun 2021 naik kembali menjadi 3,56. Kenaikan tingkat kemiskinan menjadikan catatan khusus Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Data mengenai Garis Kemiskinan Kota Administrasi Jakarta Selatan pada tahun 2017 sebesar 620.712 rupiah/kapita/bulan; tahun 2018 sebesar 680.167 rupiah/kapita/bulan; tahun 2019 sebesar 729.256 rupiah/kapita/bulan; tahun 2020 sebesar 782,7 rupiah/kapita/bulan. Pandemi Covid-19 menjadikan sulitnya pemulihan daya beli penduduk, yang akan menyulitkan pula bagi penduduk miskin untuk melewati garis kemiskinan.

III.3.4.4 Kemacetan

Kemacetan lalu lintas masih menjadi masalah besar transportasi di Jakarta Selatan. Kemacetan membuat biaya transportasi dan biaya persediaan bahan baku meningkat serta dapat menurunkan produktivitas tenaga kerja. Pekerja yang harus menembus kemacetan menuju kantor sudah mengalami kelelahan ketika sampai sehingga tidak mampu bekerja secara optimal. Kondisi demikian dapat bermuara pada terhambatnya pertumbuhan ekonomi di wilayah Kota Jakarta Selatan. Salah satu penyebab utama kemacetan di Jakarta adalah pembangunan infrastruktur belum mampu mengimbangi jumlah kendaraan yang melintas serta masih belum optimalnya pembatasan penggunaan kendaraan. Idealnya 20 persen dari total luas lahan di suatu wilayah seharusnya digunakan untuk infrastruktur transportasi, seperti jalan. Namun, kondisi eksisting total luas jalan di Jakarta masih sangat minim yaitu hanya sekitar 6-7 persen dari total luas lahan.

III.3.4.5 Kewenangan Penyelenggara Kota Administrasi Jakarta Selatan

Dalam kerangka pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, kedudukan Kota Administrasi Jakarta Selatan berbeda dengan wilayah kota lainnya di Indonesia yang memiliki asas otonomi daerah tingkat kota/kabupaten

sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun kedudukan Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam kerangka pemerintahan Provinsi DKI Jakarta merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang membantu Gubernur dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Camat dan Lurah serta mengoordinasikan, memantau dan mengawasi operasional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Hal tersebut berimplikasi pada terbatasnya kewenangan Walikota beserta perangkatnya yang hanya memiliki fungsi koordinasi, fasilitas dan administrasi. Akan tetapi, tidak memiliki fungsi teknis dalam menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan lintas urusan yang terus berkembang di wilayahnya. Namun demikian, Kota Administrasi Jakarta Selatan berfungsi sebagai lapisan terdepan dalam berinteraksi dengan persoalan-persoalan masyarakat, sehingga keterbatasan kewenangan tersebut menjadi akar masalah dalam konteks pelayanan kepada warga masyarakat di Jakarta Selatan.

III.3.5 Isu Strategis Kota Administrasi Jakarta Selatan

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang dijelaskan, maka isu strategis Kota Administrasi Jakarta Selatan pada Tabel 3.3 di bawah ini.

Tabel 3.3 Isu Strategis Kota Administrasi Jakarta Selatan

Permasalahan	Isu-Isu				Isu strategis Jakarta Selatan
	Global	Nasional	Regional (DKI Jakarta)	Lokal (Jakarta Selatan)	
Rawan bencana banjir dan kebakaran	Perubahan Iklim Global (Climate Change) dan Mempercepat Ambisi, Dampak dan Akuntabilitas Iklim	Ketahanan Pangan dan Energi	Ketahanan terhadap Bencana Alam dan Non Alam	Rawan Kebakaran dan Banjir	Koordinasi lintas sektoral
Angka kriminalitas masih tinggi	Krisis dan Konflik Kemanusiaan yang	Stabilitas Politik, Hukum,		Laju Urbanisasi	

	Berkembang	Pertahanan dan Keamanan			
Masih rendahnya ketaatan masyarakat terhadap Perda					
Layanan pendidikan dan kesehatan yang belum merata	Respon dan Pemulihan Pandemi Covid-19	Peningkatan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia		
Organisasi sosial budaya belum berkembang optimal	Mendorong Aksi Mendesak terhadap Kesetaraan Gender dan Hak-Hak Perempuan		Pembangunan Budaya Multikultur		
Sarana dan prasarana dasar masih belum merata		Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Kota Berkelanjutan	Kemacetan	
Angka kemiskinan masih tinggi	Pengentasan Kemiskinan dan SDGs	Kemiskinan di daerah Perkotaan	Ekonomi Inklusif	Kemiskinan di daerah Perkotaan	Pemberdayaan Masyarakat
Tingkat pengangguran terbuka masih tinggi		Pemulihan Ekonomi Nasional	Pemerataan Pembangunan		
Kewenangan terbatas hanya koordinasi, evaluasi dan pengendalian	Globalisasi Teknologi dan Informasi	Transformasi Pelayanan Publik	Pemerintahan Dinamis dan Transformasi Pelayanan Publik	Kewenangan Penyelenggara Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kolaborasi Pelayanan Publik
Banyaknya mitra kerja yang harus dikoordinasi					
Partisipasi masyarakat belum optimal					

Sumber : Kota Administrasi Jakarta Selatan, 2022

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Isu-isu strategis yang telah dirumuskan, digunakan menetapkan tujuan dan sasaran Kota Administrasi Jakarta Selatan. Tujuan dan sasaran merupakan formulasi kebijakan strategis yang menjadi tolok ukur pencapaian pembangunan ke depan yang dilakukan melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, dan politis yang holistik. Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan fungsi dengan menjawab isu strategis aktual. Sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan perangkat daerah yang diperoleh dari hasil (outcome) program perangkat daerah yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, dan rasional.

Tujuan dan sasaran Renstra Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023-2026 dirumuskan berdasarkan tujuan dan sasaran RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 serta tugas dan fungsi Kota Administrasi Jakarta Selatan. Tujuan dan sasaran Renstra Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023-2026 terdapat pada Tabel 4.1 di bawah ini.

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023-2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				Satuan	2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Selatan Sebagai Kota Ekonomi Kreatif yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal.	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan yang Optimal.	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	Nilai	86.75	87.3	87.85	89.5
			1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan Kegiatan kemasyarakatan di Kecamatan (termasuk di Kelurahan).	Nilai	88.5	88.6	88.7	88.8
			2. Nilai Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi.	Nilai	85	86	87	88.5

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Kota Administrasi Jakarta Selatan melakukan perumusan strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Startegi merupakan langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk mencapai sasaran. Arah kebijakan merupakan rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Kota Administrasi Jakarta Selatan yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran startegi. Adapun Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023-2026 terdapat pada Tabel 5.1 di bawah ini.

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kota Administrasi Jakarta Selatan 2023-2026

TUJUAN 1 RPD : Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik dan Manajemen Pemerintahan Berintegritas			
SASARAN 1 RPD : Meningkatnya Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Selatan Sebagai Kota Ekonomi Kreatif yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal.	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan yang Optimal.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana serta sistem pelayanan kepada masyarakat di Kota Administrasi Jakarta Selatan; 2. Meningkatkan kualitas sistem koordinasi dan kolaborasi yang efektif dan efisien dengan seluruh mitra kerja Kota Administrasi Jakarta Selatan; 3. Meningkatkan kualitas pelayanan perkantoran untuk mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat serta mengoptimalkan koordinasi dan kolaborasi lintas bidang urusan bersama seluruh mitra kerja Kota Administrasi Jakarta Selatan; 2. Mengoptimalkan kualitas sarana dan prasarana pengembangan kewilayahan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pelimpahan Kewenangan Kelurahan, Kecamatan Dan Kota Administrasi Jakarta Selatan; 3. Mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan perkantoran untuk meningkatkan kepuasan pelayanan perkantoran dan keprotokolan;

TUJUAN 1 RPD : Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik dan Manajemen Pemerintahan Berintegritas			
SASARAN 1 RPD : Meningkatnya Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		4. Meningkatkan kualitas pembinaan, pengawasan dan evaluasi pada kecamatan dan kelurahan.	4. Mengoptimalkan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pada kecamatan dan kelurahan untuk meningkatkan capaian penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program/kegiatan Perangkat Daerah disusun berdasarkan ketentuan dan aturan yang tertuang didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Lebih dari itu rencana program/kegiatan disusun berdasarkan kewenangan, serta tugas pokok dan fungsi Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai perangkat daerah unit pembantu Gubernur. Program, Indikator Program, Kegiatan dan Indikator Kegiatan serta pagu indikatif Kota Administrasi Jakarta Selatan secara terperinci disajikan dalam Tabel 6.1 di bawah ini.

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Indikatif Kota Administrasi Jakarta Selatan 2023-2026

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
4.1	MENINGKATNYA KUALITAS, AKSESIBILITAS, DAN KEMUDAHAN LAYANAN MASYARAKAT															
1	TERWUJUDNYA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN SEBAGAI KOTA EKONOMI KREATIF YANG MEMBERIKAN LAYANAN PUBLIK DAN PEMERATAAN HASIL PEMBANGUNAN OPTIMAL	INDEKS KEPUASAN LAYANAN KOTA ADMINISTRASI	Nilai	0	86,75	533.895.146.880	87,3	565.428.390.198	87,85	745.973.051.612	89,5	669.410.882.891	89,5	2.514.707.471.581		
1.1	MENINGKATNYA KINERJA MELALUI KOORDINASI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN YANG OPTIMAL	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN KEGIATAN KEMASYARAKATAN DI KECAMATAN DAN KELURAHAN	Nilai	0	88,5	533.895.146.880	88,6	565.428.390.198	88,7	745.973.051.612	88,8	669.410.882.891	88,8	2.514.707.471.581		
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN	Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)	Indeks	4	4	466.200.388.286	4	494.726.612.924	4	671.213.699.967	4	589.458.496.669	4	2.221.599.197.846	BAGIAN KEPEGAWAIAN, KETATALAKSANA N DAN PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	DKI JAKARTA
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU	Indeks	4	4		4		4		4		4		BAGIAN KEPEGAWAIAN, KETATALAKSANA N DAN PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	

																KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Nilai	4	4	8.097.391.125	4	8.211.924.083	4	8.291.702.139	4	8.379.021.398	4	32.980.038.745	KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	DKI JAKARTA	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN		
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	1	1	8.097.391.125	1	8.211.924.083	1	8.291.702.139	1	8.379.021.398	4	32.980.038.745	KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	DKI JAKARTA	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Nilai	4	4	257.489.919.907	4	266.342.887.639	4	324.245.315.972	4	341.130.172.925	4	1.189.208.296.443	KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	DKI JAKARTA	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	12	12	257.489.919.907	12	266.342.887.639	12	324.245.315.972	12	341.130.172.925	48	1.189.208.296.443	KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	DKI JAKARTA	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi	Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Nilai	4	4	198.266.400.782	4	217.479.522.052	4	338.045.237.512	4	237.371.567.923	4	991.162.728.269	KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	DKI JAKARTA	
7.01.02.6.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelompok Masyarakat	2,564	2,628	2.809.508.206	2,576	3.716.919.084	2,566	3.764.250.971	2,566	4.092.454.419	10,336	14.383.132.680	KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	DKI JAKARTA	

7.01.02.6.02.03	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan	Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Laporan	12	12	8.945.874.882	12	9.577.226.180	12	10.442.321.253	12	11.306.457.585	48	40.271.879.900	KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	DKI JAKARTA
7.01.02.6.02.04	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Lembaga	2,875	3,098	175.995.805.128	3,098	186.619.428.766	3,098	313.973.026.122	3,098	211.589.991.861	3,098	888.178.251.877	KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	DKI JAKARTA
7.01.02.6.02.05	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Laporan	4	4	6.542.117.291	4	9.273.468.754	4	5.250.235.349	4	5.447.801.580	16	26.513.622.974	KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	DKI JAKARTA
7.01.02.6.02.06	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Laporan	1	1	2.229.177.819	1	2.422.324.816	1	2.589.716.137	1	2.788.553.873	4	10.029.772.645	KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	DKI JAKARTA
7.01.02.6.02.07	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan	Laporan	1	1	330.003.215	1	391.732.404	1	448.013.187	1	480.555.106	4	1.650.303.912	KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	DKI JAKARTA
7.01.02.6.02.08	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Laporan	0	0	0	1	3.991.286.951	0	0	0	0	1	3.991.286.951	KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	DKI JAKARTA
7.01.02.6.02.09	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Keolahragaan Tingkat Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Keolahragaan Tingkat Kelurahan	Laporan	0	1	1.413.914.241	1	1.487.135.097	1	1.577.674.493	1	1.665.753.499	4	6.144.477.330	KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	DKI JAKARTA
7.01.02.6.04	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten	Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Nilai	4	4	2.346.676.472	4	2.692.279.150	4	631.444.344	4	2.577.734.423	4	8.248.134.389	KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	DKI JAKARTA
7.01.02.6.04.01	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan yang Disediakan	Laporan	12	12	1.953.941.600	12	2.147.860.333	12	203.206.936	12	2.136.278.287	48	6.441.287.156	KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	DKI JAKARTA
7.01.02.6.04.02	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan	Laporan	4	4	204.028.600	4	209.609.973	4	219.279.016	4	230.497.744	16	863.415.333	KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	DKI JAKARTA
7.01.02.6.04.03	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kecamatan	Laporan	1	1	188.706.272	1	196.195.111	1	208.958.392	1	210.958.392	4	804.818.167	KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI	DKI JAKARTA

															JAKARTA SELATAN	
7.01.02.6.04.04	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kecamatan	Laporan	0	0	0	1	138.613.733	0	0	0	0	1	138.613.733	KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	DKI JAKARTA
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA	Indeks	4	4	65.764.225.685	4	68.676.566.011	4	72.566.489.346	4	77.708.306.252	4	284.715.587.294	BAGIAN KEPEGAWAIAN, KETATALAKSANAAN DAN PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	DKI JAKARTA
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Nilai	4	4	47.112.811.755	4	49.912.062.740	4	51.262.896.298	4	55.000.290.599	4	203.288.061.392	KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	DKI JAKARTA
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	2767	2770	47.112.811.755	2770	49.912.062.740	2770	51.262.896.298	2770	55.000.290.599	11080	203.288.061.392	KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	DKI JAKARTA
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan	Nilai	4	4	18.651.413.930	4	18.764.503.271	4	21.303.593.048	4	22.708.015.653	4	81.427.525.902	KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	DKI JAKARTA
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	97	152	17.997.477.445	152	18.098.139.224	152	20.624.680.060	152	22.016.426.277	152	78.736.723.006	KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	DKI JAKARTA

7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan	7062	1765	653.936.485	1765	666.364.047	1765	678.912.988	1765	691.589.376	7060	2.690.802.896	KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	DKI JAKARTA
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum	Indeks	4	4	1.930.532.909	4	2.025.211.263	4	2.192.862.299	4	2.244.079.970	4	8.392.686.441	BAGIAN KEPEGAWAIAN, KETATALAKSANAAN DAN PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	DKI JAKARTA
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan	Persen	0	100	1.930.532.909	100	2.025.211.263	100	2.192.862.299	100	2.244.079.970	100	8.392.686.441	KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	DKI JAKARTA
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	0	4	1.930.532.909	4	2.025.211.263	4	2.192.862.299	4	2.244.079.970	16	8.392.686.441	KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	DKI JAKARTA
1	TERWUJUDNYA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN SEBAGAI KOTA EKONOMI KREATIF YANG MEMBERIKAN LAYANAN PUBLIK DAN PEMERATAAN HASIL PEMBANGUNAN OPTIMAL	INDEKS KEPUASAN LAYANAN KOTA ADMINISTRASI	Nilai	0	86,75	442.748.506.828	87,3	424.915.496.429	87,85	452.264.650.156	89,5	449.768.142.827	89,5	1.769.696.796.240		

1.1	MENINGKATNYA KINERJA MELALUI KOORDINASI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN YANG OPTIMAL	INDEKS EFEKTIFITAS KOORDINASI KOTA ADMINISTRASI	Nilai	0	85	442.748.506.828	86	424.915.496.429	87	452.264.650.156	88,5	449.768.142.827	88,5	1.769.696.796.240		
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	4	4	439.694.659.433	4	421.713.039.034	4	449.141.873.761	4	446.501.430.432	4	1.757.051.002.660	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	DKI JAKARTA
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik	Persen	40	15		30		45		60		60		BAGIAN PEMERINTAHAN	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks	4	4	344.999.772.593	4	344.212.092.209	4	343.458.664.401	4	342.631.731.441	4	1.375.302.260.644	KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN BAGIAN KEUANGAN	DKI JAKARTA
7.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	815	758	344.994.772.593	715	344.204.592.209	674	343.451.164.401	629	342.624.231.441	2776	1.375.274.760.644	BAGIAN KEUANGAN	DKI JAKARTA
7.02.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	5.000.000	12	7.500.000	12	7.500.000	12	7.500.000	48	27.500.000	BAGIAN KEUANGAN	DKI JAKARTA
7.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Nilai	4	4	128.000.000	4	3.000.000	4	3.000.000	4	3.000.000	4	137.000.000	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	DKI JAKARTA
														KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN		

															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	
7.02.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	0	1	128.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	4	137.000.000	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	DKI JAKARTA
7.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks	4	4	420.369.772	4	435.152.127	4	421.959.600	4	435.011.709	4	1.712.493.208	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	DKI JAKARTA
7.02.01.1.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	0	76	31.433.900	80	43.241.648	10	8.723.636	10	6.843.540	176	90.242.724	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	DKI JAKARTA
7.02.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	0	33	388.935.872	33	391.910.479	33	413.235.964	33	428.168.169	132	1.622.250.484	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	DKI JAKARTA

7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks	4	4	15.898.573.555	4	16.372.013.111	4	17.400.278.769	4	17.013.319.127	4	66.684.184.562	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	DKI JAKARTA
7.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	0	52	895.140.485	50	931.684.465	50	981.667.021	51	1.033.144.121	203	3.841.636.092	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	DKI JAKARTA
7.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	135	165	5.071.608.894	147	5.119.267.058	166	5.423.233.580	170	5.452.760.975	648	21.066.870.507	KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	DKI JAKARTA
7.02.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	0	98	1.826.563.144	88	1.670.743.129	97	1.746.047.857	97	1.660.289.876	380	6.903.644.006	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	DKI JAKARTA
7.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	0	100	2.734.913.809	87	2.926.895.886	99	3.102.670.044	99	2.886.630.007	385	11.651.109.746	KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI	DKI JAKARTA

															JAKARTA SELATAN	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	
7.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	0	115	1.091.011.177	103	1.140.637.525	115	1.241.166.912	114	1.188.184.849	447	4.661.000.463	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	DKI JAKARTA A
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	
7.02.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	0	2	320.000.000	2	330.000.000	2	340.000.000	2	340.000.000	8	1.330.000.000	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	DKI JAKARTA A
7.02.01.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	4	163	3.518.608.243	163	3.759.864.014	163	4.029.647.485	163	3.865.164.262	652	15.173.284.004	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	DKI JAKARTA A
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	
7.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	4	131.580.000	4	131.580.000	4	131.580.000	4	131.580.000	16	526.320.000	BAGIAN PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP BAGIAN PEREKONOMIAN BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BAGIAN PEMERINTAHAN	DKI JAKARTA A
7.02.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	0	1	250.000.000	1	300.000.000	1	350.000.000	1	400.000.000	4	1.300.000.000	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	DKI JAKARTA A
7.02.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	0	1	59.147.803	1	61.341.034	1	54.265.870	1	55.565.037	4	230.319.744	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	DKI JAKARTA A

	Berbasis Elektronik pada SKPD																KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks	4	4	28.046.527.258	4	8.573.279.255	4	32.964.115.408	4	32.085.002.396	4	101.668.924.317	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	DKI JAKARTA A		
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN			
7.02.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0	380	2.753.502.000	0	0	76	495.000.000	0	0	456	3.248.502.000	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL BAGIAN PEMERINTAHAN	DKI JAKARTA A		
7.02.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	48	2.881.063.588	48	2.258.369.943	48	2.378.494.738	48	2.251.734.987	192	9.769.663.256	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	DKI JAKARTA A		
7.02.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	50	2	20.859.094.830	3	4.350.000.000	2	29.000.000.000	2	29.000.000.000	9	83.209.094.830	BAGIAN PEMERINTAHAN	DKI JAKARTA A		
7.02.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	1	753.355.070	2	1.410.380.017	1	521.658.018	1	383.822.320	5	3.069.215.425	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI	DKI JAKARTA A		

															JAKARTA SELATAN	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	
7.02.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	19	799.511.770	19	554.529.295	19	568.962.652	19	449.445.089	76	2.372.448.806	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	DKI JAKARTA A
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	4	4	30.230.414.339	4	31.597.768.473	4	33.489.576.127	4	33.984.135.426	4	129.301.894.365	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	DKI JAKARTA A
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	
7.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	0	12	5.227.466	12	10.716.305	12	16.479.586	48	32.423.357	KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	DKI JAKARTA A
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	
7.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	8.000.000.000	12	8.200.000.000	12	8.400.000.000	12	8.600.000.000	48	33.200.000.000	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	DKI JAKARTA A
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	

7.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	4	3.504.641.707	4	3.671.879.169	4	4.335.461.174	4	3.619.900.347	16	15.131.882.397	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	DKI JAKARTA
7.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	18.725.772.632	12	19.720.661.838	12	20.743.398.648	12	21.747.755.493	48	80.937.588.611	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	DKI JAKARTA
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	4	4	19.971.001.916	4	20.519.733.859	4	21.404.279.456	4	20.349.230.333	4	82.244.245.564	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	DKI JAKARTA
7.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	439	619	4.501.909.298	538	4.617.195.250	602	4.903.957.936	727	4.304.503.995	2486	18.327.566.479	KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	DKI JAKARTA
7.02.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	76	320.845.000	76	290.650.000	76	269.500.000	76	240.500.000	304	1.121.495.000	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI	DKI JAKARTA

															JAKARTA SELATAN	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	
7.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1089	1646	3.422.796.792	1631	3.790.472.933	1791	3.994.917.343	1636	3.540.448.238	6704	14.748.635.306	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	DKI JAKARTA A
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	
7.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	50	13	4.100.577.666	13	4.100.577.666	13	4.100.577.666	13	4.100.577.666	52	16.402.310.664	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	DKI JAKARTA A
7.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	23	174	6.544.865.588	171	6.604.854.146	171	6.912.379.709	170	6.953.423.938	686	27.015.523.381	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	DKI JAKARTA A
															BAGIAN PEMERINTAHAN	
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	
7.02.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	391	792	1.080.007.572	671	1.115.983.864	787	1.222.946.802	670	1.209.776.496	2920	4.628.714.734	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	DKI JAKARTA A
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI	

															JAKARTA SELATAN	
7.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Pemerintahan	Nilai	0	85	3.053.847.395	86	3.202.457.395	87	3.122.776.395	88,5	3.266.712.395	88,5	12.645.793.580	BAGIAN PEMERINTAHAN BAGIAN HUKUM	DKI JAKARTA A
		Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Nilai	0	85		86		87		88,5		88,5		BAGIAN PEREKONOMIAN	
		Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai	0	85		86		87		88,5		88,5		BAGIAN PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
7.02.02.6.03	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	Persentase Perkara/Sengketa Hukum yang ditindakanjuti	Persen	100	100	3.053.847.395	100	3.202.457.395	100	3.122.776.395	100	3.266.712.395	100	12.645.793.580	BAGIAN HUKUM	DKI JAKARTA A
		Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi yang di Atas 80%	Persen	100	100		100		100		100		100			
7.02.02.6.03.01	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kota Administrasi	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	Lembaga	7062	1765	130.680.000	1765	130.680.000	1765	130.680.000	1765	130.680.000	7060	522.720.000	BAGIAN PEMERINTAHAN	DKI JAKARTA A
7.02.02.6.03.02	Pengurusan Perkara di Pengadilan Tingkat Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Pengurusan Perkara di Pengadilan Tingkat Kota Administrasi	Dokumen	0	4	174.145.000	4	174.145.000	4	174.145.000	4	174.145.000	16	696.580.000	BAGIAN HUKUM	DKI JAKARTA A
7.02.02.6.03.03	Penyelesaian Sengketa Pertanahan Tingkat Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Penyelesaian Sengketa Pertanahan Tingkat Kota Administrasi	Dokumen	0	4	31.680.000	4	31.680.000	4	31.680.000	4	31.680.000	16	126.720.000	BAGIAN HUKUM	DKI JAKARTA A

7.02.02.6.03.04	Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Tingkat Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Kegiatan Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Tingkat Kota Administrasi	Dokumen	0	4	41.100.000	4	41.100.000	4	41.100.000	4	41.100.000	16	164.400.000	BAGIAN HUKUM	DKI JAKARTA
7.02.02.6.03.05	Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) Kota Administrasi	Dokumen	0	1	10.450.000	1	10.450.000	1	10.450.000	1	10.450.000	4	41.800.000	BAGIAN HUKUM	DKI JAKARTA
7.02.02.6.03.06	Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja Walikota Kota Administrasi	Jumlah Laporan dan Evaluasi Kinerja Walikota Kota Administrasi yang Disusun	Laporan	4	4	8.750.000	4	8.750.000	4	8.750.000	4	8.750.000	16	35.000.000	BAGIAN KEPEGAWAIAN, KETATALAKSANAAN DAN PELAYANAN PUBLIK	DKI JAKARTA
7.02.02.6.03.07	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi	Jumlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi yang Disusun	Laporan	1	1	2.593.080	1	2.593.080	1	2.593.080	1	2.593.080	4	10.372.320	BAGIAN KEPEGAWAIAN, KETATALAKSANAAN DAN PELAYANAN PUBLIK	DKI JAKARTA
7.02.02.6.03.08	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembentukan Kewirausahaan Baru pada Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembentukan Kewirausahaan Baru pada Kota Administrasi	Dokumen	4	4	1.800.000	4	1.800.000	4	1.800.000	4	1.800.000	16	7.200.000	BAGIAN PEREKONOMIAN	DKI JAKARTA
7.02.02.6.03.09	Penyelenggaraan Kegiatan Keprotokolan Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Keprotokolan Kota Administrasi	Dokumen	0	4	422.000.000	4	422.000.000	4	422.000.000	4	422.000.000	16	1.688.000.000	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	DKI JAKARTA
7.02.02.6.03.10	Penyelenggaraan Tamu dan Jamuan Resmi Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Tamu dan Jamuan Resmi Kota Administrasi	Dokumen	4	4	250.000.000	4	260.000.000	4	270.000.000	4	280.000.000	16	1.060.000.000	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	DKI JAKARTA
7.02.02.6.03.11	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Sehat di Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Sehat di Kota Administrasi	Dokumen	2	2	8.100.000	2	8.100.000	2	8.100.000	2	8.100.000	8	32.400.000	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	DKI JAKARTA
7.02.02.6.03.12	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi	Dokumen	2	2	260.000.000	2	260.000.000	2	260.000.000	2	260.000.000	8	1.040.000.000	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	DKI JAKARTA
7.02.02.6.03.13	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Layak Anak di Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Layak Anak di Kota Administrasi	Dokumen	2	2	1.800.000	2	1.800.000	2	1.800.000	2	1.800.000	8	7.200.000	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	DKI JAKARTA
7.02.02.6.03.14	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi BOP dan BOS di Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi BOP dan BOS di Kota Administrasi	Dokumen	1	1	13.000.000	1	13.000.000	1	13.000.000	1	13.000.000	4	52.000.000	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	DKI JAKARTA

7.02.02.6.03.15	Pelaksanaan Partisipasi Kota Administrasi dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Partisipasi Kota Administrasi dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)	Dokumen	1	1	57.029.500	1	57.029.500	1	57.029.500	1	57.029.500	4	228.118.000	BAGIAN PEMERINTAHAN	DKI JAKARTA
7.02.02.6.03.16	Pembinaan dan Evaluasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Evaluasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi	Dokumen	1	1	16.575.000	1	16.575.000	1	16.575.000	1	16.575.000	4	66.300.000	BAGIAN PEMERINTAHAN	DKI JAKARTA
7.02.02.6.03.18	Pelaksanaan Rapim dan Rakorwil Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Rapim dan Rakorwil Kota Administrasi	Dokumen	4	4	107.250.000	4	107.250.000	4	107.250.000	4	107.250.000	16	429.000.000	BAGIAN PEMERINTAHAN	DKI JAKARTA
7.02.02.6.03.20	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan/Pembangunan/Rehab Total/Rehab Sedang Kantor Lurah Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Kegiatan/Pembangunan/Rehab Total/Rehab Sedang Kantor Lurah Kota Administrasi	Dokumen	1	1	9.750.000	1	9.750.000	1	9.750.000	1	9.750.000	4	39.000.000	BAGIAN PEMERINTAHAN	DKI JAKARTA
7.02.02.6.03.22	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan dan Pemanfaatan Ruang Bangunan	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan dan Pemanfaatan Ruang Bangunan	Dokumen	4	4	2.880.000	4	2.880.000	4	2.880.000	4	2.880.000	16	11.520.000	BAGIAN PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	DKI JAKARTA
7.02.02.6.03.24	Penyusunan dan Evaluasi Standar Operasional dan Prosedur Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Standar Operasional dan Prosedur Kota Administrasi yang Disusun dan dievaluasi	Dokumen	2	2	9.110.000	2	9.110.000	2	9.110.000	2	9.110.000	8	36.440.000	BAGIAN KEPEGAWAIAN, KETATALAKSANAAN DAN PELAYANAN PUBLIK	DKI JAKARTA
7.02.02.6.03.25	Pengendalian dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Tingkat Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Tingkat Kota Administrasi	Dokumen	4	4	11.050.000	4	11.050.000	4	11.050.000	4	11.050.000	16	44.200.000	BAGIAN KEPEGAWAIAN, KETATALAKSANAAN DAN PELAYANAN PUBLIK	DKI JAKARTA
7.02.02.6.03.26	Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Administrasi	Dokumen	1	1	4.400.000	1	4.400.000	1	4.400.000	1	4.400.000	4	17.600.000	BAGIAN KEPEGAWAIAN, KETATALAKSANAAN DAN PELAYANAN PUBLIK	DKI JAKARTA
7.02.02.6.03.27	Pelaksanaan Koordinasi Pengukuran Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi Pengukuran Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kota Administrasi yang Dilaksanakan	Dokumen	1	1	5.525.000	1	5.525.000	1	5.525.000	1	5.525.000	4	22.100.000	BAGIAN KEPEGAWAIAN, KETATALAKSANAAN DAN PELAYANAN PUBLIK	DKI JAKARTA
7.02.02.6.03.28	Pembinaan Administrasi Kepegawaian Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Pembinaan Administrasi Kepegawaian Kota Administrasi	Dokumen	4	4	8.660.000	4	8.660.000	4	8.660.000	4	8.660.000	16	34.640.000	BAGIAN KEPEGAWAIAN, KETATALAKSANAAN DAN PELAYANAN PUBLIK	DKI JAKARTA
7.02.02.6.03.32	Keikutsertaan Pemerintah Kota Administrasi pada Pelaksanaan MTQ	Jumlah Laporan Partisipasi Pemerintah Kota Administrasi pada Pelaksanaan MTQ Tingkat Provinsi DKI Jakarta	Laporan	0	1	320.790.000	1	442.550.000	1	352.869.000	1	486.805.000	4	1.603.014.000	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	DKI JAKARTA

	Tingkat Provinsi DKI Jakarta															
7.02.02.6.03.36	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kota Administrasi yang Disusun	Dokumen	1	1	36.451.580	1	36.451.580	1	36.451.580	1	36.451.580	4	145.806.320	BAGIAN KEUANGAN	DKI JAKARTA
7.02.02.6.03.37	Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Tingkat Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Penatausahaan Keuangan Tingkat Kota Administrasi	Dokumen	4	4	13.800.000	4	13.800.000	4	13.800.000	4	13.800.000	16	55.200.000	BAGIAN KEUANGAN	DKI JAKARTA
7.02.02.6.03.38	Pelaksanaan Koordinasi Bidang Perbendaharaan Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi Bidang Perbendaharaan Kota Administrasi	Dokumen	4	4	6.500.000	4	6.500.000	4	6.500.000	4	6.500.000	16	26.000.000	BAGIAN KEUANGAN	DKI JAKARTA
7.02.02.6.03.39	Peningkatan Tugas dan Fungsi Dewan Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Tugas dan Fungsi Dewan Kota Administrasi	Dokumen	12	12	847.561.535	12	847.561.535	12	847.561.535	12	847.561.535	48	3.390.246.140	BAGIAN PEMERINTAHAN	DKI JAKARTA
7.02.02.6.03.40	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kota Administrasi	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kota Administrasi	Laporan	2	2	191.400.000	2	208.250.000	2	208.250.000	2	208.250.000	8	816.150.000	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	DKI JAKARTA
7.02.02.6.03.42	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi	Dokumen	4	4	25.436.700	4	25.436.700	4	25.436.700	4	25.436.700	16	101.746.800	BAGIAN KEUANGAN	DKI JAKARTA
7.02.02.6.03.44	Penagihan Kewajiban Fasos Fasum dan Sinkronisasi Data SIPPT Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Penagihan Kewajiban Fasos Fasum dan Sinkronisasi Data SIPPT Kota Administrasi	Dokumen	4	4	14.400.000	4	14.400.000	4	14.400.000	4	14.400.000	16	57.600.000	BAGIAN PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	DKI JAKARTA
7.02.02.6.03.45	Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan di Bawah Koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan di Bawah Koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Administrasi	Dokumen	4	4	2.880.000	4	2.880.000	4	2.880.000	4	2.880.000	16	11.520.000	BAGIAN PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	DKI JAKARTA
7.02.02.6.03.46	Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan di Bawah Koordinasi Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan di Bawah Koordinasi Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Kota Administrasi	Dokumen	4	4	6.300.000	4	6.300.000	4	6.300.000	4	6.300.000	16	25.200.000	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	DKI JAKARTA

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN

Kinerja penyelenggaraan urusan bertujuan untuk menggambarkan kinerja pelayanan Kota Administrasi Jakarta Selatan yang mengemban urusan pemerintahan umum sesuai pembagian bidang urusan dalam UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Penjabaran lebih lanjut disampaikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Kota Administrasi Jakarta Selatan
Tahun 2023-2026

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)
1	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	Nilai	N/A	86.75	87.3	87.85	89.5	89.5
2	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan Di Kecamatan dan Kelurahan	Nilai	N/A	88.5	88.6	88.7	88.8	88.8
3	Indeks Efektifitas Koordinasi Kota administrasi	Nilai	N/A	85	86	87	88.5	88.5
4	Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)	Indeks	4	4	4	4	4	4
5	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan Ruang Interaksi Warga	Indeks	4	4	4	4	4	4
6	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU	Indeks	4	4	4	4	4	4
7	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum	Indeks	4	4	4	4	4	4
8	Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Pemerintahan	Nilai	N/A	85	86	87	88.5	88.5
9	Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Nilai	N/A	85	86	87	88.5	88.5

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
10	Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai	N/A	85	86	87	88.5	88.5
11	Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor	Indeks	4	4	4	4	4	4
12	Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik	Persen	40	15	30	45	60	60

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang diselaraskan dengan RPJPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026. Hal ini dalam rangka untuk mendukung tercapainya visi dan misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Dokumen ini juga berfungsi sebagai acuan kerja dan ukuran keberhasilan kinerja Kota Administrasi Jakarta Selatan. Dengan demikian, Renstra merupakan dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan evaluasi kinerja Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023-2026.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kota Administrasi Jakarta Selatan, maka perlu dilakukan monitoring, pengendalian, dan evaluasi terhadap rencana kerja, pelaksanaan, dan hasil kinerja Renstra Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023-2026.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. (2007). UU RI No 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Jakarta : BNPB.
- Bloom, Benjamin S., etc. (1956). Taxonomy of Educational Objectives : The Classification of Educational Goals, Handbook I Cognitive Domain. New York : Longmans, Green and Co.
- Bryson, John M. (2001). Perencanaan Strategis bagi Organisasi Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fahmi, Irham. (2015). Manajemen Strategis. Bandung: CV Alfabeta.
- Handoko, T. Hani. (2016). Manajemen. Yogyakarta : BPF.
- Kerzner, H. (2001). Project Management. Seventh Edition. New York: John Wiley & Sons, Inc.
- Kota Jakarta Selatan Dalam Angka 2022.
- Provinsi DKI Jakarta Dalam Angka 2022.
- Rangkuti, Freddy. (2016). Teknik Membedakan Kasus Bisnis Analisis SWOT. Jakarta : PT Gramedia.
- Rachmat. (2014). Manajemen Strategik. Bandung: CV Pustaka Setia.
- World Cities Culture Report . (2015). <https://www.london.gov.uk/what-we-do/arts-and-culture/arts-and-culture-publications/world-cities-culture-report-2015>.